

**STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM
MENYUKSESKAN KTT G20 TAHUN 2022 DI TENGAH
PERANG RUSIA - UKRAINA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

**RB.M Dwiki Kurniawan Sutan Pamungkas
NIM I92219088**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
APRIL 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rb. M Dwiki Kurniawan Sutan Pamungkas

NIM : I92219088

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam menyukkseskan KTT
G20 tahun 2022 di tengah perang Rusia - Ukraina

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 6 April 2023

Yang Menyatakan



Rb.M Dwiki Kurniawan Sutan Pamungkas

I92219088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Rb.M Dwiki Kurniawan Sutan Pamungkas

NIM : I92219088

Program Studi : Hubungan Internasional

berjudul “Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah perang Rusia - Ukraina”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 26 Desember 2022

Pembimbing



Dr. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I

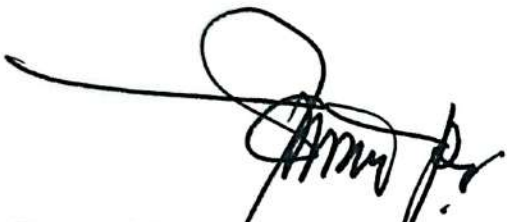
NIP197706232007101006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Rb.M Dwiki Kurniawan Sutan Pamungkas dengan judul : “Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah perang Rusia - Ukraina” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 6 April 2023.


TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



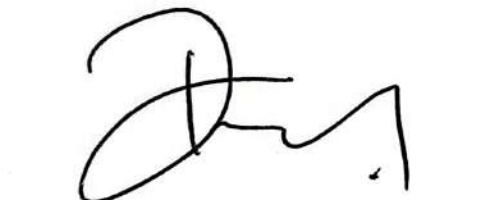
Dr. Abid Rohman. S. Ag, M.Pd. I
NIP. 197706232007101006

Penguji II



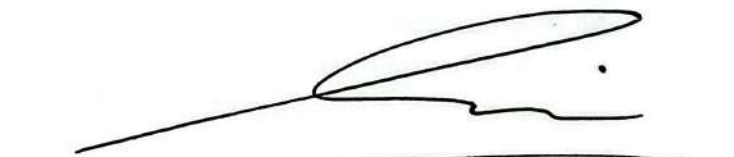
M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.,C.I.QnR.
NIP. 198408232015031002

Penguji III



Zudan Rosyidi, SS. MA
NIP. 198103232009121004

Penguji IV



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP. 199104092020121012

Surabaya, 28 April 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Dr. Abd Chalik, M.Ag.
NIP. 197506272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RBM. Dwiki Kurniawan Seton Pamungkas
NIM : 192219008
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : dwiki.ksp.20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyukseskan
KTT G20 Tahun 2022 Di Tengah Perang Rusia dan Ukraina

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 - 08 - 2023

Penulis



(RBM Dwiki K SP)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Rb.M Dwiki Kurniawan Sutan Pamungkas, 2023. *Strategy of Indonesia's foreign policy for the success of the 2022 G20 Summit in the middle of war Russia - Ukraine.*

This research discusses Indonesia's foreign policy strategy for the success of the 2022 G20 Summit in the midst of the Russia – Ukraine war. The purpose of this research is to find out the foreign policy strategy of Indonesia's strength in the midst of the conflict between Russia and Ukraine. Researchers used a qualitative descriptive research method. Data collection methods used are interviews and documentation. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique using the sense model according to Sugiono. After conducting research, it can be seen that Indonesia's foreign policy strategy in succeeding the G20 Summit in 2022 in the midst of the Russia-Ukraine conflict is to make diplomatic visits to countries in conflict and build intense communication with member countries.

Keywords : *foreign policy strategy, G20, Indonesia foreign policy. Multilateral Forum*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi politik luar negeri Indonesia untuk menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah perang Rusia – Ukraina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kebijakan luar negeri kekuatan Indonesia di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model inderaksi menurut Sugiono. Setelah melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah konflik Rusia Ukraina ialah dengan melakukan kunjungan diplomatik ke negara yang berkonflik dan membangun komunikasi yang intens dengan negara – negara anggota. G20.

Kata kunci : *Strategi Politik Luar Negeri, Politik Luar Negeri Indonesia, G20, Multilateral Forum*

DAFTAR ISI

JUDUL	1
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	2
PERSETUJUAN PEMBIMBING	3
LEMBAR PENGESAHAN	4
MOTTO	5
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Argumentasi Utama	22
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	23
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	25
A. Strategi Politik Luar Negeri Menurut Robert Putnam	25
B. Politik Luar Negeri Indonesia.....	28
C. KTT G20.....	33
D. Forum Multilateral.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis (<i>Level of Analysis</i>)	46
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	47

E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	51
H. Tahapan Penelitian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Tekanan domestik dan internasional menurut <i>Two-Level Games</i> Robert Putnam.....	54
B. Politik Luar Negeri Indonesia dengan prinsip Bebas – Aktif	57
C. Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meyukseskan KTT G20	62
D. Identifikasi suksesnya KTT G20 tahun 2022 di Bali di tengah perang Rusia - Ukraina.....	67
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi utama, dan sistematika penulisan skripsi

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia internasional dikagetkan dengan peristiwa 2 negara besar yang saling berseteru yaitu Rusia dan Ukraina. Pada akhirnya tepat 24 Februari 2022 yang lalu, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi ke Ukraina. Pasukan Rusia Ukraina bertempur di perbatasan Rusia – Ukraina. Kemudian Rusia melakukan gerakan secara represif dengan langsung merebut kota – kota yang ada di Ukraina. Seperti Mariupol, Kharkiv, Odessa, dan tentu Kyiv. Konflik Rusia Ukraina ini tentu menyebabkan adanya pro-kontra antara beberapa kelompok tertentu, organisasi internasional serta negara-negara yang berada di dunia untuk mendukung salah satu dari negara ini atau tidak mendukung.¹

Salah satu organisasi internasional yang mendukung konflik Rusia Ukraina ini adalah NATO. NATO (North Atlantic Treaty Organizations) merupakan salah satu organisasi internasional berbasis kolektif yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan yang didirikan pada tahun 1949 oleh Amerika Serikat serta beberapa negara barat lainnya. Negara seperti Amerika dan sekutunya sangat aktif menyuarakan tentang pemboikotan dan

¹ “Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina,” diakses 10 April 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina>.

menjatuhkan sanksi kepada Rusia dan menyuarakan terkait pemberian bantuan berupa senjata dan amunisi kepada Ukraina untuk melawan Rusia.²

Selanjutnya, negara – negara anggota NATO mayoritasnya ialah juga anggota forum multilateral G20. Seperti Amerika, Prancis, Inggris, Kanada adalah salah satu contoh dari negara yang tak hanya menjadi anggota NATO namun juga G20. G20 sendiri adalah forum internasional yang berfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 mewakili kekuatan ekonomi dan politik dunia, dan keanggotaannya menyumbang 80% dari PDB dunia, 75% dari ekspor global, dan 60% dari populasi global. Sehingga G20 dengan kata lain ialah sebuah forum yang dibentuk dengan tujuan untuk membangun dan mengatasi masalah perekonomian dunia.

Disisi lain Indonesia merupakan salah satu anggota G20 atau kelompok 20 negara-negara industri dan berkembang terbesar di dunia tersebut. Pada tahun 2022 Indonesia mendapatkan mandat Presidensi tuan rumah forum G20 tersebut. Italia memberikan mandat 31 Oktober 2021, dan secara resmi Indonesia memegang tampuk kepemimpinan Presidensi G20 2022. Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi global dan mempromosikan kerja sama internasional untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. KTT G20 kali ini Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali. KTT ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi

² “Crimea Vote Deepens Crisis and Draws Denunciations - The New York Times,” diakses 10 April 2023, <https://www.nytimes.com/2014/03/07/world/europe/ukraine.html>.

Indonesia untuk memperkuat peran dan kontribusinya di forum ekonomi global.³

Namun, KTT G20 2022 di Bali akan diadakan di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Konflik ini memiliki potensi untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi secara global. Dampak dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina berisiko terhadap inflasi terhadap harga gas global. Rusia memasok lebih dari persediaan gas alam Uni-Eropa, dan ancaman terhadap supply ini dapat membuat harga gas meroket tinggi.

Laporan menyebutkan tekanan pada supply gas alam dapat memicu volatilitas di pasar energi lainnya. Invasi Rusia ke Ukraina dapat membuat harga minyak melonjak hingga \$150 per barel, yang akan menurunkan pertumbuhan PDB global hampir 1% dan inflasi ganda. Lebih lanjut dijelaskan, bahkan jika minyak naik \$100 per barel, ini akan menyebabkan biaya input dan harga konsumen melonjak. Ukraina ditetapkan menjadi eksportir jagung terbesar ketiga di dunia menurut International Grains Council. Sedangkan Rusia adalah pengeksportir gandum utama dunia. Ukraina juga merupakan pengeksportir utama biji barley dan gandum hitam. Harga pangan saat ini hanya akan diperburuk dengan kenaikan harga lainnya, terutama jika Rusia merebut daerah pertanian inti di Ukraina. Terdapat 14

³ “Apa itu G20 dan Manfaatnya untuk Indonesia,” diakses 10 April 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html>.

negara yang bergantung pada Ukraina untuk lebih dari 10% impor gandum, salah satunya adalah Indonesia.⁴

Indonesia sebagai negara yang tidak terdampak langsung akibat dari adanya perang Rusia – Ukraina ini membuat Indonesia tidak memiliki pilihan yang banyak. Indonesia kemudian menyesuaikan harga bahan pangan sesuai dengan keadaan tanpa bisa menekan harga. Sehingga harga – harga di pasar dalam negeri mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan.

Selanjutnya, disisi lain Indonesia harus tetap mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan KTT G20 sebagai Presidensi dengan sukses. Selain itu Indonesia juga mengalami tekanan intervensi dari mayoritas negara anggota untuk tidak mengundang dan mengeluarkan Putin yakni selaku Presiden dari Rusia dan memberikan ancaman dengan mengancam bahwa jika Indonesia bersikeras untuk menghadirkan Rusia di G20 di Bali maka negara – negara lain tersebut akan tidak hadir pada acara forum. Ancaman ini dikemukakan langsung oleh Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh negara sekutu Amerika Serikat.⁵

Pada akhirnya KTT G20 di Bali akan menjadi ajang pertemuan yang penting bagi para pemimpin dunia dalam merumuskan kebijakan ekonomi global. Namun, tak bisa dipungkiri konflik Rusia-Ukraina yang terus berlanjut dapat mempersulit upaya Indonesia dalam menyukseskan KTT ini sesuai dengan tema yang telah digagas Indonesia sejak menjadi Presidensi G20 tahun

⁴ “Dampak Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Supply Chain Indonesia,” diakses 28 April 2023, <https://www.abcexpress.id/blog/invasi-rusia-ukraina-supply-chain>.

⁵ “G20: Negara Barat ancam boikot KTT G20, upaya lobi Indonesia ‘diragukan berhasil’ dan diminta ‘tetap netral’ - BBC News Indonesia,” diakses 3 Mei 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61007312>.

2022 dan membuat para negara anggota memiliki kesamaan dalam hal visi dan misi terkait pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi Covid – 19 berakhir. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan strategi politik luar negeri yang tepat untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa KTT G20 di Bali berjalan dengan lancar dan sukses.

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana strategi politik luar negeri Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di Bali di tengah terjadinya perang Rusia – Ukraina.

B. Fokus Penelitian

Keterkaitan dan kepemilikan *historical* yang panjang dengan kedua negara yang berkonflik saat ini yakni Rusia – Ukraina serta tekanan dari banyak negara mengenai posisi yang diambil oleh Indonesia dalam konflik ini membuat kebijakan politik luar negeri Indonesia menjadi sangat vital. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditemukan fokus penelitian yaitu,

Bagaimana Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah terjadinya perang Rusia – Ukraina ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

Bagaimana Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah terjadinya perang Rusia – Ukraina.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai konflik Rusia – Ukraina yang terjadi dan bagaimana posisi Indonesia dalam konflik ini;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi untuk penelitian mendatang yang relevan dengan topik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan acuan bagaimana dunia internasional ber interaksi;

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam memutuskan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya merupakan bahan yang dapat peneliti gunakan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam menganalisis hasil observasi lapangan. Peneliti menemukan sejumlah judul yang dapat digolongkan memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dan dapat membantu proses penelitian :

Pertama, jurnal dengan judul Pendekatan Diplomasi Ekonomi dalam Konflik rusia-ukraina karya Randy Bion Bramastya, Runitya Rompa Batan. Penelitian ini dalam penjelasannya menjelaskan tentang seberapa besar konflik yang terjadi bagi dunia secara global. Negara – negara Uni Eropa, Amerika, Korea Selatan pada akhirnya sepakat untuk melakukan cara yang menurut mereka efektif untuk segera menghentikan perang dan membuat pihak dari Rusia mengurungkan niatnya untuk menginvasi Ukraina secara lebih luas lagi. Kelompok ini menggunakan diplomasi ekonomi sebagai senjata mereka yang mana hal ini dipilih karena kelompok ini tidak ingin terlibat langsung dengan negara yang secara ekonomi dan militer tidak diragukan lagi kekuatannya.

Oleh karena itu diplomasi ekonomi dirasa cukup adil menurut mereka dan mereka mengikuti apa yang telah Amerika Serikat lakukan, yakni memblokir ekspor dan impor Rusia, memberi sanksi ekonomi, membekukan aset warga Rusia yang ada di negara mereka. Peneliti selanjutnya menemukan bahwa banyaknya sanksi yang diterima oleh Rusia saat menginvasi Ukraina tidak serta merta membuat perekonomian Rusia menjadi menurun dan mengalami resesi. Bahkan pada kenyataannya ekspor minyak mentah Rusia mengalami peningkatan. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara – negara Amerika Serikat dan sekutu kepada Rusia adalah cara mereka untuk menekan Rusia agar segera mengakhiri invasi mereka ke Ukraina. Diplomasi ekonomi erat kaitannya dengan diplomasi berkonotasi negatif. Oleh karenanya diperlukan kedaulatan

ekonomi untuk menangkal negara – negara yang berseberangan. Sehingga diplomasi ekonomi yang dilakukan tidak memiliki arti yang signifikan kepada ekonomi domestik.⁶

Kedua, jurnal berjudul Upaya Penyelesaian Konflik rusia-ukraina karya Syuryansyah, Rethorika Berthanila. Penelitian ini memaparkan sejarah konflik yang terjadi antara Rusia – Ukraina yang ternyata memiliki sejarah konflik yang panjang. Dimulai sejak Uni Soviet runtuh dan suara deklarasi Ukraina untuk menjadi negara yang berdiri sendiri pada tanggal 24 Agustus tahun 1991. Setelah bertahun – tahun lamanya hubungan diplomatik antara kedua negara ini mengalami pasang surut hingga puncaknya pada pergantian rezim pemerintahan di Ukraina yang lebih mengutamakan kebijakan yang condong kepada pihak barat sehingga membuat berkurangnya peran atau hegemoni Rusia di Ukraina. Selain itu, Ukraina juga memiliki sebuah keinginan untuk bisa bergabung dengan organisasi NATO.

Oleh karena itu tentu hal ini semakin membuat pihak Rusia naik pitam. Studi ini memberikan wawasan tentang terjadinya konflik yang disebabkan oleh konflik kepentingan, dan bagaimana negara-negara yang berkonflik dan dunia internasional mengupayakan perdamaian, sehingga tidak hanya memperluas wawasan konsep mentalitas konflik, tetapi kita juga dapat melihat bahwa dampak konflik dapat di perluas, Akibatnya, konflik yang lebih besar dipicu, dan ketegangan konflik terus meningkat. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, penelitian ini mencoba menjelaskan alasan

⁶ Randy Bion Bramastya, Runitya Rompa Batan, "Pendekatan Diplomasi Ekonomi dalam Konflik Rusia-Ukraina" *Jurnal Sospoli* 6, no. 2 (2022): 184-186

serangan militer Rusia ke Ukraina dan upaya nya untuk menyelesaikannya secara damai. Selanjutnya, peneliti berusaha menjelaskan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Peneliti menggunakan Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua negara anggota yang berkonflik harus menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, adil dan tidak berbahaya. Penulis berasumsi bahwa setidaknya ada 4 alternatif yang bisa digunakan untuk mengakhiri konflik ini. Yakni negosiasi, good offices, melalui organisasi internasional, dan yang terakhir mediasi.⁷

Ketiga, jurnal dengan judul Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia - Ukraina Tahun 2022 karya Adib Izzuddin. Jurnal ini menyorot fokus ke awal bagaimana Rusia menjadi “marah” kepada Ukraina. Sejak dahulu pasca Uni Soviet runtuh menjadi negara satelit bagi Rusia. Dimana Ukraina mendapat banyak pengaruh dari politisi, oligarki, pluktorat Rusia. Yang kemudian membuat pemerintahan Ukraina menjadi negara yang korup dengan menduduki peringkat 130 dari 180 negara. Melihat hal tersebut, rakyat Ukraina menggelar aksi yang dikenal dengan “revolusi orange”. Gerakan ini dilakukan untuk menentang secara penuh intervensi Rusia ke Ukraina dan menuntut Ukraina untuk demokrasi secara penuh. Pada akhirnya revolusi ini memenangkan Yushchenko sebagai presiden Ukraina yang baru menggantikan Yanukovich. Selain itu, penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan explanatory.

⁷ Suryansyah , Rethorika Berthanila, "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina" *Jurnal Power International Relation* 7 No. 1 (2022) 98

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis untuk meningkatkan pemahaman penulis dan pembaca terhadap fenomena, aktivitas, atau proses sosial yang diamati. Metode ini digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab fenomena internasional guna menemukan hipotesis atas apa yang terjadi. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dan metode interpretatif untuk menemukan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan. Dalam menjawab pertanyaan, penulis tidak dapat sepenuhnya menggunakan data asli, melainkan mengandalkan data sekunder yang ada yang relevan dengan pertanyaan. Analisis data untuk mendapatkan jawaban tentang upaya penyelesaian konflik rusia-ukraina pada tahun 2022. Kemudian peneliti membahas langkah apa saja yang telah dilakukan oleh dunia internasional untuk menyelesaikan konflik ini.

Akhirnya Turki menjadi negara pertama yang menjadi mediator bagi kedua negara tersebut. Namun pembicaraan damai tersebut masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Perang masih terus berlanjut hingga saat ini. Akar permasalahan yang tidak kunjung dapat diselesaikan menjadi salah satu faktor terbesar kenapa perang ini terus berlanjut. Hingga pada akhirnya peneliti memberikan opini penyelesaian atas masalah konflik Rusia – Ukraina. Peneliti mengatakan bahwa penggunaan Peacemaking, peacekeeping and peacebuilding, upaya perdamaian melalui mediasi harus tetap menjadi pilihan utama penyelesaian konflik. Upaya kedua adalah menyamakan posisi negosiasi Ukraina dengan Rusia. Salah satu upaya yang perlu ditingkatkan dalam hal ini adalah penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi

terhadap ekonomi diperkirakan akan mengganggu stabilitas ekonomi Rusia, sehingga mengurangi posisi negosiasi Rusia.. Dengan demikian peneliti berharap bahwa upaya untuk melakukan resolusi konflik mengalami peningkatan sehingga konflik segera bisa di akhiri. ⁸

Keempat, Skripsi berjudul "Persaingan AS-Tiongkok terhadap Indonesia dan Implikasinya terhadap Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif" yang ditulis oleh Muh Ainul Amal membahas tentang persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri bebas dan proaktif. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing untuk menjadi negara terbesar. Namun, setelah dekade tersebut, Republik Rakyat Tiongkok menggantikan Uni Soviet sebagai pesaing utama Amerika Serikat. RRT mampu menandingi AS dalam bidang politik, ekonomi, industri, teknologi, dan militer. Persaingan ini menimbulkan dilema bagi negara-negara kecil dan berkembang di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, karena mereka harus memperhatikan hubungan dengan AS dan RRT yang sangat vital dari segi ekonomi. Oleh karena itu, penulis menegaskan pentingnya kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan proaktif dalam menentukan arah dan posisi kebijakan Indonesia ke depan.⁹

Kelima, Artikel jurnal Sita Hadriyah berjudul "Eskalasi Ketegangan Rusia - Ukraina" menganalisis situasi sebenarnya dari hubungan antara Rusia

⁸ Adib Izzuddin, Rossi Indra korniawan, Hastian Akbar Stiarso, "Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia - Ukraina Tahun 2022" *Jurnal Pena Wima* 2 No. 2, 2022 1-3

⁹ Muh Ainul Amal, Skripsi "Persaingan Amerika Serikat - RRT Kepada Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Politik luar Negeri Bebas Aktif" (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021)

dan Ukraina dan latar belakang meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Para peneliti menemukan bahwa Rusia dan Ukraina memiliki hubungan geopolitik yang saling bertentangan. Secara geopolitik, Ukraina terbagi antara faksi pro-Eropa di barat dan faksi pro-Rusia di timur. Kedua negara ini dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet, namun setelah keruntuhannya, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Rusia dan Ukraina menjalin hubungan diplomatik pada 14 Februari 1992, yang diikuti dengan berbagai perjanjian dan perjanjian kerja sama pada tahun 1997. Hubungan bilateral antara kedua negara berfluktuasi dari waktu ke waktu, termasuk perubahan kepemimpinan yang membawa Ukraina ke Barat, mengurangi peran Rusia. Selain itu, Ukraina memiliki aspirasi untuk bergabung dengan Uni Eropa, dan dalam perkembangannya, para pemimpin Ukraina yang pro-Eropa juga memiliki aspirasi untuk bergabung dengan NATO. Para peneliti menyimpulkan bahwa episode krisis Rusia-Ukraina tidak dapat diprediksi dengan jelas karena masih tergantung pada upaya para pemimpin, konsensus antara kedua belah pihak, dan pretensi pertahanan masing-masing pihak, perang dapat meletus. Untuk mencegah terjadinya perang dunia kedua, masyarakat internasional harus terus bekerja menuju penyelesaian damai melalui negosiasi dan diplomasi. Indonesia perlu berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah antara Rusia dan Ukraina karena memiliki kebijakan luar negeri yang otonom dan aktif. Konfrontasi yang berlarut-larut akan berdampak buruk bagi banyak pihak, termasuk negara-negara Eropa dan non-Eropa. Hubungan yang rusak

tersebut dapat berupa kerjasama ekonomi dan perdagangan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat masing-masing negara.¹⁰

Keenam, Konstruksi pemikiran politik luar negeri Mohammad Hatta yang bebas dan aktif dikaji dalam tesis Achmad Ryyan Andifaprasta, “Biografi Politik Mohammad Hatta: Historiografi Pemikiran Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif”. Hatta dikreditkan dengan menciptakan filosofi Politik Bebas dan Aktif, yang masih memandu Negara Kesatuan Indonesia dalam keputusan kebijakan luar negerinya. Menurut para akademisi, Indonesia telah menempuh politik luar negeri yang bebas dan aktif sejak menjadi negara berdaulat. Keleluasaan untuk melakukan politik luar negeri tanpa dibatasi oleh kelompok atau negara tertentu disebut bebas dan aktif. Padahal dunia berada di akhir Perang Dunia II ketika hari "bebas dan aktif" ditetapkan sebagai prinsip kebijakan luar negeri dan memasuki era Perang Dingin. Indonesia tidak dapat mencapai ini tanpa bantuan blok dan organisasi pejuang. Keterlibatan negara Indonesia dalam urusan politik internasional tergolong aktif. Menurut pembukaan UUD 1945, aktif lebih dari sekedar berpartisipasi; itu juga memerlukan memiliki tujuan. Di Majelis Kerja KNIP pada tanggal 2 September 1948, Moh Hatta mengajukan usulan awal untuk politik luar negeri yang bebas dan tegas. Peneliti selanjutnya membahas signifikansi dan evolusi kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan proaktif. Indonesia telah mampu membuktikan bahwa politik luar negerinya benar-benar bebas dan aktif selama beberapa tahun. Dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia-

¹⁰ Sita Hidriyah, "Eskalasi Ketegangan Rusia – Ukraina," *Jurnal Info Singkat* 14, No. 4 2022 7

Afrika (AAC) dan Gerakan Non-Blok, Indonesia muncul sebagai kekuatan utama di balik integrasi negara-negara di dunia berkembang (GNB). Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Semacam penyelidikan disebut penelitian eksplorasi menyajikan kejadian secara rinci dan menggabungkan peristiwa terkait ke dalam konteks logis. Makalah ini mengkaji asal-usul konsep bebas aktif dan menjelaskan mengapa Hatta merasa penting untuk mengadopsi kebebasan dan aktivitas sebagai pedoman kebijakan luar negeri dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter Berger. Menurut konstruktivisme, manusia adalah produk dan kontributor bagi masyarakat. Momen dialektis internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi ditelaah dalam konstruksi sosial artikel ini. Tujuan internalisasi adalah untuk menangkap awal pemikiran yang mengalir secara alami. Mengapa kebijakan bebas dan aktif harus dipilih dijelaskan oleh obyektifikasi. Eksternalisasi menggarisbawahi metode ekspresi diri Hatta, dirinya dan pemikiran bebasnya kepada masyarakat.¹¹

Ketujuh, Jurnal dengan “Indonesia sebagai Middle Power Niche Diplomacy Strategy in Achieving Sustainable Maritime Development Based on Blue Economy” yang ditulis oleh Abdul Basir Donny Polanunu dan Demeiati Nur Kusumaningrum, mengkaji pendekatan Pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan maritim berkelanjutan dengan memanfaatkan posisinya sebagai perantara kekuatan.. Awalnya peneliti menjelaskan tentang blue economy. Peneliti memaknai blue economy sebagai suatu gagasan atau

¹¹ Achmad Ryyan Andifaprasta, Skripsi "*Biografi Politik Mohammad Hatta: Historiografi Pemikiran Politik Luar Negeri Bebas - Aktif*," (Malang: Universitas Brawijaya: 2019)

model kebijakan yang ditujukan untuk menyeimbangkan pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut agar ketersediaannya dapat terus diperoleh. Dari perspektif kajian hubungan internasional, keberadaan ekonomi biru sejalan dengan wacana pembangunan global atau konsep yang biasa disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia juga merupakan salah satu negara yang fokus dalam mengembangkan sektor kelautan yang berkelanjutan. Dalam proses implementasinya, Indonesia menjadikan konsep ekonomi biru sebagai dasar kebijakan maritim. Selanjutnya, Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kekuatan menengah dalam hal kebijakan luar negeri. Klaim tersebut berdasarkan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Termuat dalam Rancangan Strategi Kementerian Luar Negeri 2015-2019. Dalam draf tersebut tertulis bahwa Indonesia berencana untuk selalu berperan sebagai middle power dalam politik luar negeri. Secara umum hal ini dicapai melalui kerjasama bilateral dengan negara mitra strategis dan organisasi internasional untuk meningkatkan partisipasi Indonesia di tingkat internasional, sehingga Indonesia dapat memberikan pengaruh sesuai dengan kemampuan kekuatan menengah. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitiannya pada langkah Indonesia menjadikan blue economy sebagai basis kebijakan luar negerinya, dengan fokus pada pengembangan sektor maritim yang berkelanjutan. Penulis penelitian menggunakan teori kerangka identitas middle power dan niche diplomacy untuk mengevaluasi isu-isu yang dibahas. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasilnya menunjukkan bahwa

Pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan laut berkelanjutan di garis depan kebijakan nasionalnya dan berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan lautan dunia berdasarkan prinsip ekonomi biru. Komitmen ini akan dicapai melalui peningkatan kerjasama di bidang maritim pada tingkat bilateral, multilateral dan regional. Secara khusus, komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk bahwa hal tersebut merupakan strategi Pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan kelautan yang berkelanjutan, yaitu menjadi pemrakarsa pembentukan forum kerjasama (pembentukan aliansi), dan menjadi penghubung antar negara kepentingan pembangunan kelautan berkelanjutan, dan menjunjung tinggi norma-norma internasional di bidang maritim. Kemaritiman untuk kebaikan bersama (katalisator).¹²

Kedelapan, Diplomasi "Kekuatan Menengah" Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo," ditulis oleh Rizky Alif Alvian, Ganesh Cintika Putri, dan Irfan Ardhani. Artikel tersebut membahas penyesuaian yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo terhadap strategi diplomasi kekuatan menengah Indonesia. Meskipun kedua presiden melihat Indonesia sebagai middle power, penulis artikel ini mencari perbedaan pandangan kedua presiden dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Artikel ini menggunakan studi kasus untuk membahas diplomasi perbatasan dan maritim serta topik-topik seperti demokrasi, Islam, dan hak asasi manusia. Penulis

¹² Abdul Basir Donny Polanunu, Demeiati Nur Kusumaningrum "Indonesia Sebagai Middle Power Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy," *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)* Vol. 4 No.2, Agustus 2022

mengklaim bahwa pendekatan diplomasi middle power Indonesia telah berubah dari “relational power” menjadi “meta-power.” Di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia berusaha meraih keuntungan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan, sementara di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berusaha kepentingannya sendiri dengan mempengaruhi, mengubah, atau menetapkan aturan dalam politik internasional. Jurnal ini juga menekankan bahwa peran meta-power semakin penting dalam strategi diplomasi middle power Indonesia.¹³

Kesembilan, Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana negara dengan status middle power berperilaku dan melihat preferensi diplomasi negara middle power. Seiring berjalannya waktu konsep middle power semakin banyak menarik perhatian para ahli dikarenakan semakin banyaknya negara bagian selatan yang telah berkembang dan menimbulkan pengaruh terhadap perluasan tolak ukur terkait middle power itu sendiri. Sejak lama atau dua dekade terakhir negara IBSA (India, Brazil, South Africa) telah menjadi negara dengan status middle powernya, namun kini negara - negara seperti Meksiko, zindonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia telah muncul untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh negara dengan status middle power. Oleh karnanya dampak tersebut membuat negara negara ini sebagai kekuatan baru di kategori negara dengan kekuatan middle power. Baik negara dengan status "middle power lama" atau negara baru yang mendapat julukan sebagai "negara middle power baru" berusaha saling menjalin hubungan dengan

¹³ Rizky Alif Alvian, Ganesh Cintika Putri, dan Irfan Ardhani, "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo", *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 6, NO. 2, Oktober 2017-Maret 2018

sesama negara middle power untuk membangun hubungan koalisi. Selanjutnya, jurnal ini berisi dan menjelaskan tentang bagaimana negara dengan status middle power berperilaku dan bagaimana keadaan tatanan dunia global telah bereformasi serta krisis ekonomi dunia membuat tuntutan akan kekuatan dari negara dengan status middle power telah berubah. Meningkatnya pluralisme dalam tata kelola global memberikan peluang yang lebih besar bagi negara untuk mengambil peran kekuatan menengah, tetapi pada saat yang sama, persaingan antar negara untuk posisi tersebut telah meningkat secara substansial. Dalam hal ini, calon negara dengan kekuatan menengah harus memenuhi kriteria yang lebih menuntut untuk membenarkan status tersebut dalam hubungan internasional, sedangkan klasifikasi kekuatan menengah harus mengakomodasi variabel analitis tambahan.¹⁴

Kesepuluh, Agus Haryanto mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif didasarkan pada dua prinsip dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Prinsip Bebas Aktif dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran”. Prinsip pertama menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk merdeka dan penjajahan harus diakhiri karena bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Pendirian negara Indonesia, menurut premis kedua, dimaksudkan untuk turut melaksanakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

¹⁴ Charalampos Efstathopoulos, "Middle Powers and the Behavioural Model", *Global Society*, 32(1), 47-69 Aberystwyth University

Karena kebijakan luar negerinya yang aktif dan komitmennya pada konsep kebebasan, Indonesia dapat memilih sikapnya sendiri terhadap isu-isu global tanpa dibatasi oleh aliansi politik atau militer. Prinsip bebas aktif ini bertahan sejak tahun 1945 dan masih menjadi dasar bagi Indonesia dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Dalam artikel ini, prinsip bebas dan aktif akan dilihat dari perspektif teori peran. Sejak tahun 1945, Indonesia terus mendasarkan keputusan politik luar negerinya pada konsep bebas aktif ini. Gagasan untuk bebas dan aktif akan ditelaah dalam esai ini dari sudut pandang teori peran.

Teori peran dianggap tepat dan mampu berfungsi sebagai kerangka kerja analitis untuk negara berkembang dan negara dunia ketiga. Menurut teori peran, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh konsepsi peran dan ekspektasinya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif sejarah dan sebagai sumber utamanya bersandar pada fakta-fakta sejarah yang berorientasi teoritis. Temuan dan analisis studi menunjukkan bahwa pemerintahan Sukarno mempraktekkan gagasan bebas dan aktif dengan membantu membentuk Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok (GNB). KAA adalah politik luar negeri Indonesia yang dilandasi oleh gagasan untuk membebaskan bangsa-bangsa dunia dari penjajahan. Pada saat yang sama, ketidaksejajaran Indonesia dengan salah satu kelompok diekspresikan secara bebas melalui Gerakan Non Blok. pasca Perang Dingin, Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa prinsip dasar bebas dan aktif dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai aktivitas kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga

harus mempertimbangkan aspek lain, seperti kepentingan nasional yang sering diutamakan.¹⁵

Kesebelas, Jurnal berjudul "Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008" Hadirnya forum G20 atas kepentingannya untuk negara anggota baik maju maupun berkembang sebagai forum pertemuan, dianggap memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian pembahasan atas krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 yang diawali dari Amerika Serikat yang kemudian efeknya meluas hingga ke Uni Eropa, bentuk komitmen baik yang mengikat maupun tidak yang di hasilkan dari pertemuan forum kemudian tetap dikembalikan kesimpulannya kepada negaranegara anggota. Penyelesaian masalah dalam diskusi forum ini sudah cukup dianggap baik atas kepentingan krisis yang di alami, walaupun sebenarnya belum sempurna Karen tidak semua negara menerapkan komitmen 15 yang di hasilkan dalam pertemuan. Teori yang di gunakan penulis dalam menganalisis kasus tulisan ini adalah teori Efektivitas Rezim, dengan metode penelitian deskripsi kualitatif dan pendekatan pengumpulan data kepustakaan.¹⁶

F. Argumentasi Utama

Dalam menghadapi konflik antarnegara seperti perang Rusia-Ukraina, di tengah Presidensi G20, Indonesia menggunakan strategi politik luar

¹⁵ Agus Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume IV No.II/ Desember 2014

¹⁶ Tri Utami, Arum "Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008", Insignia Journal of International Relations 3(02):1 November 2016

negerinya dengan berlandaskan prinsip bebas – aktif. Dalam skala Internasional Indonesia melakukan kunjungan diplomatik, dan dalam skala domestik Indonesia melakukan dialog dengan para legislator untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian awal atau bab pendahuluan merupakan bagian awal dalam penelitian ini. Bab pendahuluan terdiri dari berbagai komponen seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, argumentasi utama dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kerangka konseptual ini bertujuan untuk membahas kerangka konseptual yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis hasil penelitian mengenai strategi politik luar negeri Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 di tengah perang Rusia-Ukraina. Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai konsepsi Strategi, Politik Luar Negeri Indonesia, KTT G20, dan forum multilateral.

Bab metode penelitian membahas tentang cara peneliti melakukan penelitian dengan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data, tingkat analisis yang digunakan, serta tahapan penelitian yang dilakukan.

Bab pembahasan merupakan bagian inti yaitu penyajian data dan temuan penelitian. Pada bab ini, peneliti akan menggambarkan tentang

tekanan yang diterima oleh pemerintah Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri, bentuk dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas – aktif, implementasi strategi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas – aktif dalam kaitannya menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah perang Rusia – Ukraina.

Bab penutup ini berisi kesimpulan serta saran dari peneliti yang memuat jawaban dari seluruh rumusan masalah yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

Pada bab Landasan Konseptual, peneliti akan menjelaskan mengenai konsepsi tentang Jenis konflik, konsepsi tentang Politik Luar Negeri Indonesia, konsepsi tentang Strategi Politik Luar Negeri, Politik Luar Negeri Indonesia, KTT G20, dan tentang Perang Rusia – Ukraina.

A. Strategi Politik Luar Negeri Menurut Robert Putnam

Politik dalam negeri dan hubungan internasional seringkali berhubungan satu sama lain. Banyak debat yang mempertanyakan, apakah politik domestik mencerminkan hubungan internasional atau malah sebaliknya. Maka dari itu peneliti menggunakan konsep strategi politik luar negeri menurut Robert Putnam. Robert Putnam adalah seorang ahli hubungan internasional yang dikenal dengan teori kepentingan dan interaksi internasional. Dalam pandangan Putnam, strategi politik luar negeri dapat dijelaskan melalui konsep "*two-level game*" yang menggambarkan interaksi antara aktor domestik dan internasional. Strategi politik luar negeri adalah serangkaian tindakan yang dirancang dan di implementasikan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya di luar batas negara. Hal ini melibatkan berbagai elemen seperti diplomasi, ekonomi, keamanan, budaya, dan ideologi. Strategi politik luar negeri seringkali disusun dalam jangka

panjang dan mengandung prinsip-prinsip umum yang memandu tindakan negara dalam berhubungan dengan negara-negara lain.¹⁷

Putnam dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy and Domestic Politics: the logic of Two-Level Games* yang dipublikasikan tahun 1988 tujuan strategi politik luar negeri adalah untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara di kancah internasional, baik dalam hal keamanan, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Strategi politik luar negeri dapat mencakup berbagai macam tindakan seperti negosiasi, kerja sama internasional, diplomasi, dan penggunaan kekuatan militer.¹⁸

Selanjutnya, menurut Robert Putnam diplomasi dan politik dalam negeri memiliki hubungan yang erat dalam konteks strategi politik luar negeri. Putnam mengajukan konsep "*two-level games*" untuk menjelaskan hubungan tersebut. Menurutnya "*two-level games*", negara-negara dalam melakukan diplomasi dan negosiasi di tingkat internasional akan menghadapi dua level permainan. Level pertama adalah level internasional, di mana negara-negara berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan dan memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global. Level kedua adalah level domestik, di mana kebijakan luar negeri harus mendapat dukungan dari aktor-aktor domestik seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan publik.¹⁹

¹⁷ Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," *The MIT Press* 42, no. 3 (Summer 1988): 443.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Tingkat nasional menurutnya ialah kelompok *domestic* yang mengejar kepentingan mereka dengan menekan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang menguntungkan, dan para politisi mencari kekuasaan dengan membangun koalisi di antara kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan di tingkat internasional, pemerintah nasional berupaya untuk memaksimalkan kemampuan mereka sendiri dalam memenuhi tekanan domestik, sambil meminimalkan konsekuensi negatif dari pihak asing (luar). Setiap pemimpin politik nasional (kepala negara) muncul di kedua tahap permainan.

Putnam menekankan bahwa negara-negara harus mempertimbangkan kedua level permainan tersebut dalam merancang strategi politik luar negeri. Kebijakan luar negeri yang baik adalah kebijakan yang mampu mengintegrasikan kepentingan nasional dengan tekanan dan tuntutan dari aktor-aktor domestik. Dalam hal ini, politik domestik dapat mempengaruhi keputusan politik luar negeri, dan sebaliknya, kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi politik domestik.²⁰

Putnam memberikan contoh kasus di mana strategi politik luar negeri AS mengalami kegagalan karena kurang mempertimbangkan faktor-faktor domestik seperti kelompok kepentingan dan partai politik. Dalam kasus perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA), misalnya, Presiden George H.W. Bush harus menghadapi tekanan dari kelompok kepentingan domestik yang

²⁰ *Ibid.*,

menentang perjanjian tersebut, sehingga ia kesulitan untuk memperjuangkan kebijakan luar negeri tersebut di level internasional.²¹

Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor domestik yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, strategi politik luar negeri yang baik harus mampu mempertimbangkan kedua faktor tersebut secara simultan dan mencapai keseimbangan antara kepentingan nasional dan tekanan domestik.

B. Politik Luar Negeri Indonesia

Fenomena hubungan internasional seringkali memperlihatkan isu sengketa perbatasan antar negara yang berdampak cukup besar pada lingkungan global. Jelas bahwa sengketa perbatasan sering mengakibatkan perang. Efek perang yang tidak menguntungkan kadang-kadang dapat memotivasi pihak ketiga untuk mengambil peran aktif dalam mengendalikan konflik karena, jika dibiarkan tidak terkendali, mereka dapat mengganggu stabilitas hubungan internasional. Mirip dengan perang Rusia - Ukraina, konflik perbatasan adalah perselisihan antara dua negara atau lebih atas perbedaan kepemilikan wilayah yang mengakibatkan masalah bahkan perang.²²

Indonesia sejak zaman awal kemerdekaan telah menganut sistem atau prinsip politik luar negeri bebas – aktif. Konsep politik luar negeri Indonesia yang

²¹ Ibid.,

²² Agus Budi Yulianto, Skripsi "*Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966*" (Yogyakarta: Universitas Sanatha Darma Yogyakarta : 2018) : 35

Bebas Aktif merupakan gambaran usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Tujuan dari politik bebas aktif Indonesia, yaitu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, menjaga netralitas Indonesia di kancah internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, dan memperbaiki persaudaraan antarbangsa sendiri sebagai citra dari semangat Pancasila.

Politik luar negeri membutuhkan landasan yang kuat untuk menopang kebijakannya. Indonesia sendiri memiliki tiga landasan kebijakan politik luar negeri, yaitu landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman hidup bangsa, dan sebagai sumber dari segala hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Landasan Konstitusional adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai landasan konstitusional, tujuan nasional bangsa juga tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat tentang cita-cita dan tujuan bangsa untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Landasan operasional berbeda dengan landasan idiil dan konstitusional, landasan operasional sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Landasan operasional ditetapkan melalui kebijakan masing-masing pemerintah pada masanya.

Selanjutnya, Indonesia telah menunjukkan konsistensi kebijakan luar negeri bebas aktifnya di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam menangani sengketa bilateral dengan negara lain. Sejak zaman kemerdekaan UUD 1945 merupakan landasan struktural politik luar negeri Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada alenia I dan IV pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 11 dan 13 batang tubuh. UUD 1945 merupakan landasan struktural politik luar negeri Indonesia.²³

Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia selalu berusaha untuk memainkan peran yang aktif dalam mengatasi konflik internasional. Hal ini juga berlaku dalam kasus konflik Rusia-Ukraina. Indonesia mengambil sikap netral dalam konflik ini dan mendukung upaya-upaya diplomasi dan negosiasi untuk mencapai perdamaian.

Selanjutnya, berikut beberapa bukti konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani sengketa bilateral;

- a. Peran Indonesia dalam konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand atas wilayah di sekitar kuil Preah Vihear Selanjutnya, Indonesia berusaha menengahi dengan menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan antara Kamboja dan Thailand, termasuk pada tanggal 22 Februari 2011, yang berlangsung di gedung Pancasila di Jakarta dan di mana Kamboja dan Thailand mempercayakan Indonesia untuk menengahi konflik tersebut. . Pertemuan berikutnya diadakan di Bogor pada

²³ *Ibid.*,

7-8 April 2011, dan Thailand menilai Indonesia gagal meyakinkan Kamboja untuk menerima kesepakatan. Thailand kehilangan kepercayaan pada Indonesia pada konferensi ini. Pertemuan selanjutnya terjadi di Jakarta pada KTT ASEAN ke-18 pada 7-8 Mei 2011.²⁴

Susilo Bambang Yudhoyono, presiden Indonesia dan ketua ASEAN, menawarkan tiga saran pada KTT ASEAN ke-18. Pertemuan dengan GBC diprakarsai oleh yang pertama (Komite Perbatasan Umum). Keduanya bercermin pada MOU (Momerandum Of Understanding). Bawa pengamat, ketiga (pengamat). Setelah itu, situasi terus menjadi lebih baik sampai dapat dianggap bahwa kedua negara telah menerapkan kebijakan gencatan senjata. Kemudian, pada 18 Juli 2012, kedua negara menarik tentaranya dari sekitar Kuil Preah Vihear.²⁵

b. Peran Indonesia dalam konflik Pakistan dan India terkait wilayah Kashmir.

Hubungan antara Pakistan dan India tegang sejak mereka merdeka pada tahun 1947. Hal ini terlihat dari empat konflik militer yang pecah sejak negara itu merdeka hingga saat ini. Konflik muncul sebagai akibat dari perselisihan yang sedang berlangsung atas Kashmir, wilayah yang diapit oleh kedua negara.²⁶

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Kompas Cyber Media, "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Masalah Kamboja," KOMPAS.com, 24 Juni 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/24/110000379/peran-indonesia-dalam-penyelesaian-masalah-kamboja>.

²⁶ Brilliant Windy Khairunnisa, "Resolusi Konflik Pakistan Dan India Dalam Perebutan Wilayah Kashmir dan Peluang Mediator Bagi Indonesia," *JURNAL ILMIAH WIDYA SOSIOPOLITIKA*, no. E-ISSN 2685-4570 (2021).

Dalam hal ini, Indonesia yang telah menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB sejak 2019 dan mengeluarkan pernyataan pers perdamaian sebagai bagian dari proses diplomasi di sana, telah membantu upaya stabilitas dan perdamaian internasional. Pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24 Piagam PBB, dilakukan dengan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan sesuai dengan mandat dan kewenangan Dewan Keamanan PBB. Pakistan dan India masih didorong oleh india untuk menekankan komunikasi dan dialog sebagai sarana penyelesaian sengketa secara bilateral. Duta Besar Pakistan dan India juga telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri untuk membahas perkembangan terbaru dalam krisis Kashmir.²⁷

- c. Peran Indonesia dalam konflik Myanmar terkait Rohingya. Pengungsi dari Myanmar yang dikenal sebagai Rohingya telah lama tinggal di Asia Tenggara.

Secara umum, umat Islam etnis Rohingya tidak pernah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Myanmar. Rohingya tidak diakui sebagai warga negara karena mereka dianggap sebagai imigran ilegal. Mereka juga dikategorikan sebagai orang Bangladesh karena mereka memiliki ciri fisik dan budaya yang sama dengan orang Bangladesh. Juga, mereka menghadapi

²⁷ Fathiyah Wardah, "Indonesia Minta India dan Pakistan Utamakan Dialog Dalam Isu Kashmir," VOA Indonesia, 16 Agustus 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-minta-india-dan-pakistan-utamakan-dialog-dalam-isu-kashmir/5043668.html>.

prasangka buruk, khususnya dalam kehidupan sosial dan politik Myanmar. Orang asing dianggap sebagai Rohingya.²⁸

Rohingya memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman mereka sebagai akibat dari tindakan keras pemerintah Burma terhadap mereka, yang berujung pada kemiskinan, penderitaan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).²⁹

Upaya Indonesia dalam sengketa ini adalah mendekati pemerintah Myanmar secara personal dengan pola diplomasi antar pemerintah dan merekomendasikan agar pemerintah Myanmar segera menyelesaikan konflik etnis secara imparial. Pada kenyataannya, konflik tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Selain itu, Indonesia terus mendorong kehadiran ASEAN di Asia Tenggara sebagai komunitas regional untuk mendukung upaya pemerintah Myanmar menyelesaikan sengketa, membangun kamp pengungsi Rohingya, dan menawarkan pendanaan untuk memfasilitasi repatriasi pengungsi.³⁰

C. KTT G20

Group of Twenty (G20), merupakan forum kerja sama 20 negara dunia yang terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu: Argentina, Australia, Brasil,

²⁸ Maria Elsa Karina, "Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya," *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26770>.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ "Indonesia Turun Tangan Bantu Rohingya – DW – 04.09.2017," diakses 18 April 2023, <https://www.dw.com/id/indonesia-turun-tangan-bantu-rohingya/a-40351496>.

Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Dibentuk sebagai respons atas krisis ekonomi dunia pada tahun 1997-1998, G20 lahir pada tahun 1999 sebagai forum yang bertujuan memberikan arah kebijakan internasional agar dunia keluar dari krisis serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dilaksanakan setiap tahun dimana para negara anggota G20 secara bergilir menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan organisasi tersebut. Sejak diterimanya mandat Indonesia sebagai Presidensi Group of Twenty (G20) pada 1 Desember 2021, maka secara resmi Indonesia memiliki Tugas utama kepresidenan dalam penyelenggaraan acara puncak, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berikutnya.

Pandemi Covid – 19 telah menjadi pengaruh besar terhadap perekonomian di hampir seluruh negara di dunia. Akibat pandemi covid – 19 negara – negara di dunia menerapkan kebijakan dalam negeri yang terkenal dengan istilah *lockdown*. Kebijakan ini membuat suatu negara mewajibkan suatu wilayah untuk menutup akses untuk keluar maupun masuk secara total. Hal ini untuk menekan jumlah penyebaran virus Covid – 19 saat itu. Kebijakan ini berhasil untuk menekan penyebaran virus covid – 19. Namun, ada dampak atau pengaruh terhadap sektor

perekonomian sebuah negara. Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak akibat hal ini.

Namun, seiring berjalannya waktu kebijakan ini membuat pandemi berhasil dilewati dan ditekan peredarannya, hanya saja banyak negara yang mengalami keadaan resesi ekonomi. Maka dari itu setelah pandemi Covid-19 dapat diatasi, situasi ekonomi di seluruh dunia semakin memburuk akibat sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia akibat invasi yang dilakukan ke Ukraina. Mayoritas peserta KTT G20 juga sependapat bahwa biaya pangan, pupuk, dan energi masih tertekan. Keadaan ini membuat tekanan inflasi yang sudah ada menjadi lebih buruk. Selain itu, hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya kerawanan energi dan pangan di seluruh dunia terkhusus negara anggota G- 20.

Selanjutnya, negara-negara G20 juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan. terutama untuk memenuhi berbagai masalah masa depan seperti perubahan iklim. Salah satu anggota G20 meminta agar investasi bahan bakar fosil dihentikan. Pergeseran kebijakan menuju energi terbarukan kemudian diimplementasikan secara bersamaan secara adil dan tidak memihak. Anggota G20 menganggap serangan terhadap Ukraina sebagai tindakan perang yang ilegal. Selain tidak dapat dibenarkan, serangan tersebut telah berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi di seluruh dunia.³¹

³¹ “Sri Mulyani Beberkan Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Pertemuan G20,” SINDOnews.com, diakses 30 April 2023, <https://ekbis.sindonews.com/read/800039/33/sri-mulyani-beberkan-dampak-perang-rusia-ukraina-terhadap-pertemuan-g20-1655374018>.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satu bahaya yang dihadapi Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 adalah situasi geopolitik akibat perang di Rusia dan Ukraina. "Kita sekarang dihadapkan pada harga komoditas, konflik yang menghasilkan rambatan, dan itu tentu bahaya yang sangat serius," kata Menkeu. G20 dibentuk sebagai forum kerja sama ekonomi internasional, dan itu hanya ada ketika perdamaian antara anggota dan seluruh dunia kerja sama dapat terjadi. Prinsip-prinsip inti G20 saat ini terancam karena konflik berkepanjangan dan kesulitan geopolitik lainnya, lanjutnya. Konflik tidak hanya akan mempersulit orang untuk bekerja sama dan berkoordinasi, tetapi juga akan berdampak negatif pada perekonomian dan mempersulit pemulihan. Sri Mulyani mengklaim bahwa kenaikan biaya makanan dan energi telah menyebabkan inflasi di negara-negara maju mencapai titik tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Pengetatan terkait kebijakan moneter akan datang berikutnya. Efektivitas pemulihan ekonomi global di negara-negara maju tentunya akan dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas yang kemudian akan berdampak pada negara-negara berkembang. Dia mengklaim bahwa situasi perang geopolitik sebenarnya membayangi KTT G20 pada Februari lalu. Sri Mulyani menjelaskan bahwa sulit untuk mengadakan pertemuan di tengah permusuhan karena Presidensi G20 Indonesia ingin terus membicarakan topik yang sangat penting bagi Indonesia dan dunia.³²

³² Ibid.

D. Forum Multilateral

Anne-Marie Slaughter, seorang ahli hubungan internasional dan hukum internasional, Menurut Anne-Marie Slaughter, kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama internasional di mana beberapa negara atau aktor internasional bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama melalui kerangka multilateral, seperti lembaga-lembaga internasional, forum-forum, atau perjanjian multilateral. Slaughter menyadari pentingnya kerjasama multilateral dalam menangani tantangan global yang kompleks, seperti perubahan iklim, keamanan, dan pengentasan kemiskinan.³³ Menurutnya, kerjasama multilateral memungkinkan negara-negara untuk saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual. Slaughter juga menekankan pentingnya inklusivitas dan keterlibatan semua pihak yang relevan dalam kerjasama multilateral.³⁴

Tujuan dari dilakukannya kerjasama multilateral ini bermacam-macam dan tidak sama antara organisasi satu dan yang lainnya. Setiap organisasi memiliki kepentingan dan fokus yang berbeda. Namun secara umum, tujuan kerjasama multilateral ialah sebagai berikut:

- a. Memajukan kehidupan negara-negara anggotanya.
- b. Untuk dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya perang atau konflik internasional.

³³ A. M Slaughter, *A New World Order* (United of States of America: Princeton University Press, 2005), 40–43.

³⁴ Ibid.

- c. Melakukan regulasi hubungan internasional dengan melakukan penyelesaian pertikaian antar negara melalui jalan damai.
- d. Sebagai sarana peminjaman modal, investasi dan penanaman modal.
- e. Untuk memperoleh jaminan sosial ketika menghadapi ancaman eksternal.
- f. Untuk saling bertukar produk kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri.³⁵

Selain itu, multilateral forum juga memungkinkan partisipasi dan pengaruh dari berbagai aktor non-negara seperti organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya mencapai tujuan bersama. Ini memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi atas isu-isu global.

Kerjasama yang terjalin antar negara ini kemudian memberikan manfaat berupa dampak dalam bentuk positif yang dirasakan baik secara langsung maupun dalam jangka panjang. Berikut manfaat yang didapat suatu negara yang menjadi anggota kerjasama multilateral:

- a. Dapat memasarkan produk dalam negeri. Dengan interaksi negara dengan negara lain dalam kerjasama multilateral, negara secara tidak langsung dapat memperkenalkan produk-produk yang dibuat

³⁵ Kadek Yunni, "Kerjasama Multilateral: Pengertian - Manfaat dan Contohnya," HaloEdukasi.com, 24 Agustus 2021, <https://haloedukasi.com/kerjasama-multilateral>.

negara sendiri. Sehingga jika negara lain memerlukan produk tersebut, negara akan dengan mudah memikat konsumen.

- b. Dapat menambah keuntungan negara. Dari promosi yang dilakukan, dan ketertarikan negara lain pada produk negara yang melakukan promosi, maka hal ini akan memperluas hubungan perdagangan antar negara, sehingga daya jual akan meningkat dan keuntungan negara akan bertambah.
- c. Dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Manfaat kerjasama multilateral ini saling berkaitan, ketika keuntungan negara karena penjualan produk ekspor meningkat, hal ini juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara umum.
- d. Memudahkan mendapatkan pinjaman keuangan. Beberapa organisasi multilateral bergerak dalam bidang moneter. Hal ini memudahkan anggotanya untuk mendapat pinjaman ketika sedang memerlukan.
- e. Memperluas jaringan penanam modal. Selain dapat melakukan promosi produk negara sendiri, promosi juga dapat dilakukan untuk mengambil hati para investor asing.³⁶

Maka dari itu setelah mengetahui tentan tujuan dan manfaat dari kerjasama multilateral penting untuk memahami sebuah indikator terkait sebuah

³⁶ Ibid.,

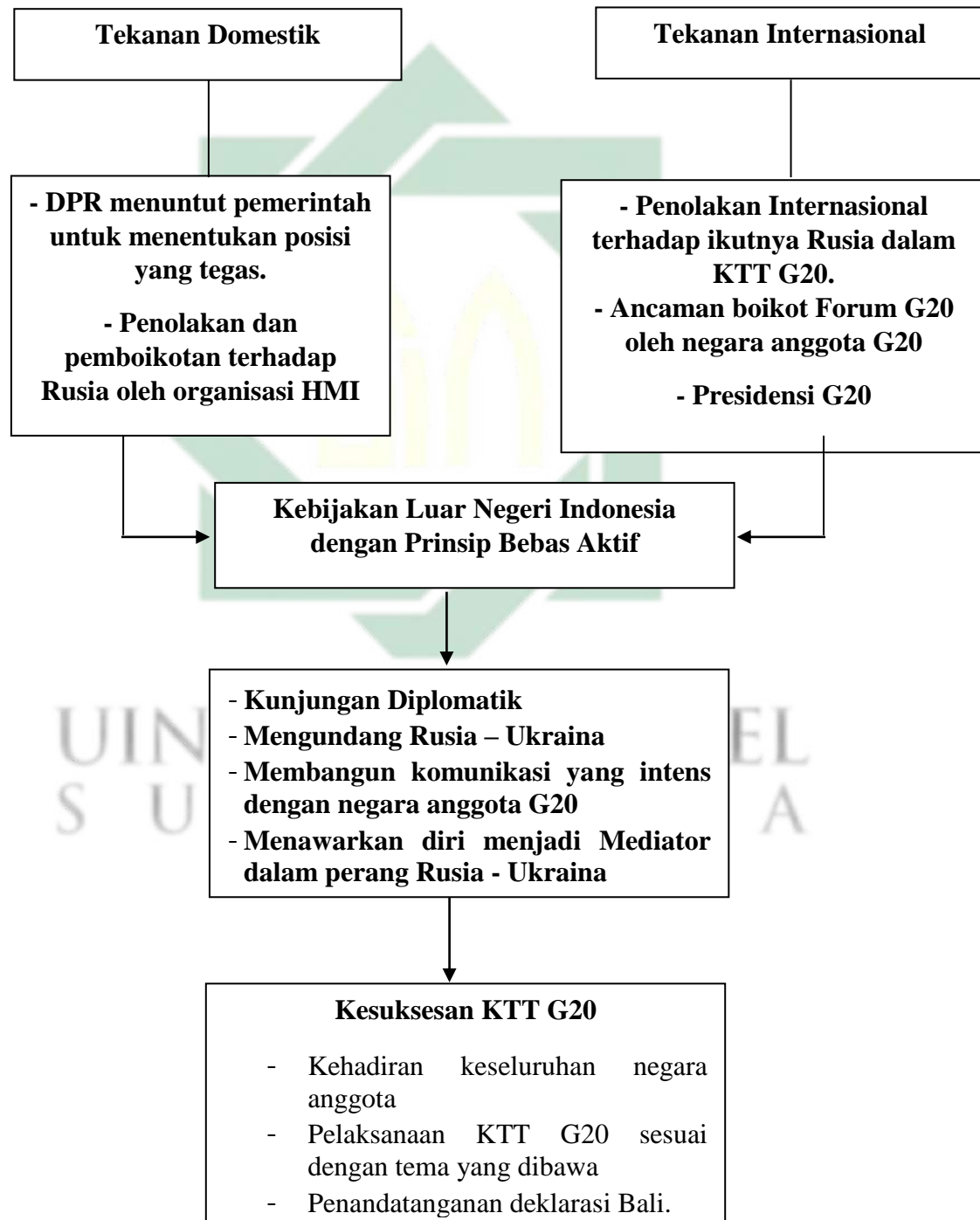
keberhasilan dari kerjasama internasional. Indikator dari sebuah keberhasilan kerjasama multilateral menurut Anne antara lain;

- a. Hasil Konkret: Indikator ini menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh kerjasama internasional dalam mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan keamanan, pembangunan ekonomi, dan penyelesaian konflik.
- b. Keberlanjutan: Indikator ini mengukur kemampuan kerjasama internasional untuk bertahan dan relevan dalam jangka waktu yang lebih lama serta kemampuan untuk menanggapi tantangan baru yang muncul.³⁷

Dengan demikian menurut Anne, kerjasama multilateral bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.

³⁷ Ibid.

KERANGKA KONSEPTUAL



Kerangka pikir diatas akan memaparkan pembahasan yang akan ada dalam tulisan, dengan lebih singkat dan jelas. Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tekanan domestik yang diterima oleh pemerintah Indonesia. Dimulai dari pihak legislatif dalam negeri hingga kelompok seperti organisasi masyarakat (ormas). Kemudian peneliti juga akan membahas tentang tekanan Internasional yang diterima oleh Pemerintah Indonesia. Baik sebagai tanggung jawab moral Presidensi G20 namun juga ancaman pemboikotan yang dilakukan oleh negara anggota G20. Selanjutnya dilanjutkan dengan membahas kebijakan politik luar negeri Indonesia yang memiliki prinsip bebas dan aktif. Selain itu peneliti akan membahas tentang implementasi dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif dalam kaitannya menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah perang Rusia – Ukraina. Kemudian yang terakhir ialah peneliti akan menjelaskan tentang mengukur kesuksesan strategi Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah perang Rusia – Ukraina.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian, peneliti menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian dan tingkat analisis (*level of analysis*), teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan tahapan penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan definisi dari Mochtar Mas'oe'd. Menurutnya, penelitian kualitatif sangat penting untuk memahami isu hubungan internasional yang kompleks dan multidimensi. Mochtar Mas'oe'd menekankan bahwa penelitian kualitatif dalam hubungan internasional harus mengadopsi pendekatan holistik dan interdisipliner. Artinya, peneliti harus melihat masalah hubungan internasional dalam konteks yang lebih luas yang mencakup sejarah, budaya, politik dalam negeri, ekonomi, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara.³⁸ Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami signifikansi yang mendasari peristiwa sosial. Peneliti akan dapat menjelaskan mengapa orang membuat keputusan dengan memahami bagaimana realitas sosial diciptakan melalui tindakan, dan temuan mereka akan berbentuk pengetahuan daripada hasil

³⁸ Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990.)
39

pengukuran berbentuk angka. Penelitian ini menggunakan tipe Metode Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Verstehen.³⁹ Dalam artian Weber ingin menekankan pentingnya memahami sosok-sosok dan kelompok-kelompok sosial dalam konteks situasi yang konkret. Ia mengajukan metodologi verstehen (memahami) untuk memahami tindakan dan keyakinan manusia. Metodologi ini memfokuskan pada interpretasi dan pemahaman fenomena sosial melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Menurut Weber, penelitian kualitatif pendekatan deskriptif harus memperhatikan konteks dan lingkungan sosial yang melingkupi individu atau kelompok yang diteliti, serta harus memperhatikan proses-proses interaksi sosial dan interpretasi subjek terhadap dunianya. Ini membutuhkan pendekatan yang subjektif dan interpretatif untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh. Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti, yang mengumpulkan data yang akan ditafsirkan sebagai fenomena lapangan. Peneliti akan berusaha menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang ada di lapangan, seperti pengalaman yang dimiliki oleh peserta penelitian, termasuk perilaku perseptual, minat, motif, dan perilaku.⁴⁰

Menurut buku Sukardi, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mencoba mengkarakterisasi dan menginterpretasikan subjek penelitian

³⁹ Suparman Sumadi, "*Bab III Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Verstehen*" <https://adoc.pub/bab-iii-metode-penelitian-kualitatif-dengan-menggunakan-pend.html>, diakses pada 15 Januari 2023

⁴⁰Ibi dan Johan Setiawan Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Deffi Ella Lestari, 1st ed. (Sukabumi, 2018).

berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Mendapatkan deskripsi yang tepat dan menyeluruh tentang fenomena atau objek penelitian adalah tujuan utama dari penelitian deskriptif, seperti menjelaskan secara menyeluruh dan memahami subjek penelitian. Tujuan penelitian deskriptif dalam situasi ini adalah untuk menciptakan deskripsi, gambaran metodis, faktual, dan akurat tentang detail, sifat, dan hubungan di antara fenomena yang diteliti. Karena peneliti akan menjelaskan data daripada mengukurnya, gaya penelitian ini sangat sesuai untuk penekanan dan tujuannya. Salah satu kelebihan dari penelitian deskriptif adalah bahwa cara ini dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau objek penelitian secara komprehensif dan akurat.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang dicari juga merupakan data-data yang bersifat kualitatif. Data-data ini peneliti peroleh melalui wawancara dan dokumentasi melalui Website Kementerian Luar Negeri Indonesia (KEMENLU) yakni www.kemlu.go.id. Data-data ini membantu peneliti untuk menjelaskan tentang apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh Indonesia di tengah konflik Rusia – Ukraina.

Peneliti juga melakukan tinjauan literatur melalui berbagai artikel berita dan artikel jurnal dan mengamati melalui *platform digital* seperti *Google*. Mengenai wawancara, peneliti telah mewawancarai pejabat Fungsional Diplomat Madya Direktorat Eropa II Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri. Beliau adalah Bapak Enjay Diana, yang merupakan pejabat Kemenlu yang terjun langsung ke dalam aktivitas yang dilakukan oleh Indonesia saat ketegangan antara Rusia – Ukraina terjadi

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada negara Indonesia dan Rusia serta Ukraina. Akan tetapi, peneliti tidak melakukan penelitian langsung di negara tersebut secara langsung. Peneliti melakukan penelitian tentang peran dan strategi politik luar negeri Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina sumber – sumber internet dan media sosial. Peneliti juga melakukan *Zoom Meetings* dengan Bapak. Enjay Diana yang merupakan *key informan* dalam penelitian ini.

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian terhitung sejak September 2022 – Januari 2023

C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis (*Level of Analysis*)

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini adalah tentang peran dan strategi politik luar negeri Indonesia di tengah konflik Rusia - Ukraina. Maka, penelitian ini akan melihat secara mendalam bagaimana inisiasi, dan capaian serta hasil dari usaha tersebut.

Menurut peneliti, tingkat analisa tingkat analisis akan membantu dalam memudahkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi perilaku aktor. Dalam definisinya, level analisis merujuk pada "unit" seperti individu, negara, atau sistem yang menjadi fokus teori. Menurut Waltz, level analisis mencakup faktor-faktor yang menjelaskan perilaku aktor, sedangkan Singer memandang level analisis sebagai target analisis yang dapat memberikan

gambaran, penjelasan, dan prediksi yang akurat tentang perilaku negara. Dalam banyak definisi lainnya, level analisis membantu peneliti untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling mempengaruhi tindakan aktor.

Pada dasarnya ada tiga level analisis dalam menjelaskan kebijakan aktor negara. Pertama adalah sistem (system-level analysis) yang kedua ada (state-level analysis) dan Level analisis yang terakhir adalah individu (individual-level analysis).⁴¹Penulis menggunakan level analisis yang kedua yakni state level analysis karena yang diteliti yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 di perang Rusia – Ukraina. Peneliti mengamati strategi yang dilakukan oleh Indonesia yang merupakan usaha untuk memperjuangkan kesuksesan Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 di Bali.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang melibatkan pengambilan sampel dari setiap populasi untuk diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi dan sifat-sifat yang dimiliki populasi tersebut. Peneliti menggunakan teknik yang dikenal sebagai purposive sampling. Purposive sampling, menurut Sugiyono, adalah pengambilan sampel yang memperhitungkan faktor-faktor tertentu sesuai dengan penarikan yang diperlukan untuk menghitung besarnya sampel yang akan diteliti.⁴²sehingga sangat berguna untuk memperoleh informasi yang spesifik dan memenuhi tujuan penelitian tertentu bagi peneliti. Dan dalam

⁴¹ Yessi Olivia, loc.cit

⁴² <http://repository.stei.ac.id/5150/4/BAB%20III.pdf> diakses pada 16 Januari 2023

penelitian kualitatif, purposive sampling membantu peneliti memilih responden yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan dan memastikan validitas hasil penelitian.

Dalam kaitannya dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pejabat Kemenlu di bidang Fungsional Diplomat Madya Direktorat Eropa II Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang juga menjadi salah satu anggota tim yang berkunjung melaksanakan aktivitas diplomasi dengan Presiden RI baik ke Rusia maupun Ukraina, yakni Bapak Enjay Diana. Hal ini dikarenakan beliau mengetahui dengan betul apa yang menjadi perhatian khusus bagi Indonesia di tengah konflik yang pecah antara Rusia dan Ukraina.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumentasi, kajian pustaka dan wawancara. Dalam hal dokumentasi, peneliti mengamati langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia di website pemerintah dan media sosial. Kementerian Luar Negeri Indonesia memiliki akun Instagram dengan user @kemlu_ri, dan website resmi dengan domain www.kemlu.go.id. Dua hal tersebut sama – sama memberikan aktivitas Kementerian Luar Negeri yang ter *up to date*. Selanjutnya dalam kajian pustaka, peneliti menggali berbagai referensi dari internet seperti artikel berita yang menuliskan tentang Indonesia, Rusia, dan Ukraina serta artikel jurnal, skripsi atau buku yang temanya sesuai dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga

melakukan wawancara dengan pejabat Kemenlu di bidang Fungsional Diplomat Madya Direktorat Eropa II Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, yang berpartisipasi dalam tim delegasi Indonesia ke Rusia – Ukraina. Beliau juga memahami mengenai topik penelitian yang diangkat oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan pada 16 Januari 2023 melalui *Zoom Meetings*.

F. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa proses analisis data melibatkan pengumpulan catatan secara sistematis dari berbagai sumber seperti pengamatan dan wawancara, dan mengaturnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mempresentasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data juga melibatkan pengambilan makna dari data yang dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek tersebut.⁴³

Proses analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengusulkan konsep reduksi data sebagai "cara menggeneralisasi data dan kemudian mengklasifikasikannya ke dalam unit konseptual tertentu, kategori tertentu, dan topik tertentu". lebih lengkap terlihat, matriks dan bentuk lainnya, sangat diperlukan untuk memfasilitasi

⁴³ Noeng Muhadjir, "*Metode Penelitian Kualitatif* ", (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).17

penyajian dan konfirmasi kesimpulan. Prosesnya tidak terjadi sekaligus, tetapi berinteraksi bolak-balik."

Pada tahap ini peneliti memilah-milah data yang sesuai, tidak sesuai dengan subjek penelitian. Peneliti akan menggunakan referensi dan data yang sesuai untuk menunjang penulisan skripsi. Sedangkan peneliti akan menyingkirkan referensi dan data yang tidak sesuai dengan topik yang diteliti..

2. Penyajian Data

Penyajian informasi merupakan tindakan mengorganisir sekelompok data sehingga dapat memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan memulai tindakan yang diperlukan. Data kualitatif dapat dihadirkan dalam bentuk narasi teks, matriks, grafik, jaringan, dan bagan, yang memungkinkan informasi yang disusun menjadi lebih mudah dipahami dan koheren. Dengan cara ini, informasi dapat dianalisis dan dilihat dengan lebih jelas, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kesimpulan dan dapat dimanfaatkan untuk diulang analisisnya.

Dengan demikian, pada tahap ini peneliti menyajikan berbagai data yang diperoleh dari dari narasumber yang diwawancarai, berbagai sumber referensi dan data – data terkait peran dan starategi politik luar negeri Indonesia dalam konflik Rusia –Ukraina.

3. Verifikasi Data

Untuk meyakinkan peneliti maupun pembaca tentang hasil penelitian, peneliti melakukan *check* dan *recheck*, benarkah data yang diperoleh dan akun media sosial dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan dari referensi lainnya.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah melakukan penyajian data dan memverifikasi data, peneliti kembali melakukan pengecekan data dan informasi yang didapat dari berbagai teknik pengambilan data, seperti wawancara dan dokumentasi. Langkah ini biasanya juga dikenal dengan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri ialah penggunaan sumber data yang berbeda untuk memperkuat keabsahan hasil penelitian. Peneliti melakukan ini agar hasil dari penelitian ini benar-benar *valid*.

H. Tahapan Penelitian

1. Tahap Persiapan atau Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan ini, peneliti menentukan topik yang akan diteliti yang memunculkan judul penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan diskusi dengan dosen wali. Peneliti tertarik untuk memilih topik tentang politik luar negeri Indonesia di tengah kekacauan atau konflik yang terjadi di Rusia - Ukraina. Berdasarkan topik tersebut, peneliti memperoleh judul yaitu “Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah perang Rusia – Ukraina”. Lalu peneliti mulai mengumpulkan

informasi melalui *platform digital*, melalui kajian pustaka dari berbagai sumber bacaan seperti artikel jurnal dan skripsi, dan observasi melalui *Instagram* dan *Website* yang menyangkut Indonesia, Rusia, dan Ukraina dan G20. Setelah mendapatkan gambaran, peneliti pun menyusun proposal dan mengikuti seminar proposal.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pencarian dan pengumpulan data. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan langkah Indonesia dalam menyukkseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah perang antara Rusia – Ukraina melalui video, foto dan berita tentang hal tersebut melalui situs internet. Peneliti juga melihat media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat Kemenlu di bidang Fungsional Diplomat Madya Direktorat Eropa II Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang mana beliau sebagai salah satu anggota tim delegasi Indonesia saat berkunjung ke Rusia dan Ukraina, yaitu Bapak Enjay Diana. Sebenarnya, peneliti menghubungi beberapa narasumber terkait dengan hal ini, namun tidak mendapatkan kepastian. Peneliti menghubungi beliau menggunakan surel yang dikirimkan kepada intansi Kementerian. Selanjutnya, mendapatkan balasan *email* dari pihak Kemenlu dan diarahkan serta ditunjukkan kepada bapak Enjay Diana. Setelah itu, peneliti membuat janji untuk melakukan wawancara melalui *Zoom Meetings*. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2022, pukul

09.00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan seputar politik luar negeri Indonesia dalam konflik Rusia - Ukraina. Tidak lupa juga peneliti menanyakan terkait posisi dan langkah Indonesia dalam forum KTT G20 di Bali tahun 2022 .Wawancara ini berlangsung sangat lancar dan interaktif. Selain itu peneliti mendapatkan sejumlah foto dokumentasi saat beliau sedang bertugas menjadi tim yang terbang berkunjung ke Rusia dan Ukraina

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data ini, peneliti mulai menyusun data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan berbagai referensi yang relevan. Peneliti membuat *ccodin-coding* tentang peran dan strategi Indonesia dalam melihat konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Dari sini akan terlihat bagaimana strategi politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 di tengah konflik Rusia – Ukraina.

4. Tahap Laporan

Pada tahap laporan ini, peneliti menulis proses dan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang topik penelitian. Skripsi ini merupakan laporan penelitian tersebut

BAB IV

PEMBAHASAN

Bagian sub bab ini akan membahas mengenai konsep *Two-Level Games* dan merelevankan dengan strategi pemerintah Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 ditengah perang Rusia - Ukraina.

A. Tekanan domestik dan internasional menurut *Two-Level Games* Robert Putnam

Pada dasarnya konsep *Two-Level Games* merupakan konsep yang membahas politik dua ranah yaitu internasional dan domestik. Seperti yang dijelaskan oleh Putnam. Menurut Putnam menyatakan *Two-Level Games* merupakan sebuah proses dimana politik internasional dan domestik tidak bisa berdiri sendiri karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Jika melihat pada kasus kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 di tengah perang Rusia - Ukraina maka kebijakan ini sangat sesuai dengan *Two-Level Games* karena dalam mengamankan dan mencapai kesuksesan menjadi Presidensi di G20 tahun 2022 Indonesia harus bisa memahami betul dalam menangani tekanan yang ada pada dalam negeri ataupun internasional. Aktor pada dua ranah harus saling bersinergi untuk mendapatkan penyelesaian masalah mengenai ancaman kegagalan forum KTT G20.⁴⁴ Maka dari itu dalam *Two Level*

⁴⁴ D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games." (447)

Games menjelaskan terkait tekanan apa saja yang diterima oleh negara dalam hal ini Indonesia baik secara domestik maupun internasional.

a. Tekanan Domestik

Robert menjelaskan pada level domestik terdapat kelompok-kelompok yang akan menekan pemerintah dengan kepentingannya sehingga membuat pemerintah mengadopsi kebijakan yang menguntungkan kelompok domestik. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden Joko Widodo untuk berperan aktif dalam mendamaikan konflik antara Rusia dan Ukraina sekaligus meredakan ketegangan yang terjadi antara pihak Barat dengan Rusia agar pelaksanaan KTT G20 dapat berjalan mulus.⁴⁵ Mereka menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Saya lihat sama sekali tidak ada upaya ke sana. Saya tidak mendengar Presiden (Joko Widodo) mengatakan saya ditelepon Presiden Rusia, saya menelepon Presiden Ukraina, nggak ada. Lima bulan Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 tidak melakukan apa-apa," ujar Effendi Muara Sakti Simbolon, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menilai G20 kini berada di ambang perpecahan karena konflik antara Rusia dengan Barat terkait invasi Rusia ke

⁴⁵ Fathiyah Wardah, "DPR Desak Presiden Jokowi Berperan Aktif dalam Meredakan Konflik Rusia-Ukraina," VOA Indonesia, 7 April 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/dpr-desak-presiden-jokowi-berperan-aktif-dalam-meredakan-konflik-rusia-ukraina-/6518797.html>.

Ukraina sejak 24 Februari lalu. Dia mencemaskan perseteruan antara Rusia dengan Barat itu akan mengganggu pelaksanaan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali November tahun ini.⁴⁶

Selain itu terdapat tekanan juga dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB HMI) mendesak Pemerintah RI menolak kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20. HMI menolak kehadiran Rusia di KTT G20 di Indonesia karena HMI tidak setuju dengan invasi Rusia terhadap Ukraina. Aksi serangan militer terhadap negara lain itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sikap Rusia terhadap Putin dinilai HMI bertentangan dengan demokrasi serta humanisme pula. Invasi Rusia juga memicu kontraksi ekonomi global. Masalah ekonomi dunia ini sangat relevan dengan G20 yang saat ini presidensinya dipegang Indonesia. HMI mengajak semua elemen masyarakat bersama-sama menolak kehadiran Putin di KTT G20. Apabila Putin hadir, invasi ke Ukraina wajib disetop.⁴⁷

b. Tekanan Internasional

Penolakan mayoritas negara anggota G20 terhadap hadirnya Rusia dalam KTT G20. Sejumlah negara Barat dan Amerika Serikat bersuara menolak rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di pertemuan G20 di Bali, Indonesia, November mendatang. Alasannya tentu terkait dengan

⁴⁶ Setjen DPR RI, "Beri Keterangan Uji Materiil UU Pengadilan HAM, DPR Tegaskan Indonesia Terapkan Politik Bebas Aktif," diakses 5 Mei 2023, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42056>.

⁴⁷ Arief Ikhsanudin, "HMI Desak Pemerintah RI Tolak Vladimir Putin di KTT G20," detiknews, diakses 5 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6004861/hmi-desak-pemerintah-ri-tolak-vladimir-putin-di-ktt-g20>.

serangan Rusia ke Ukraina yang telah menelan banyak korban jiwa. Tak hanya menolak Putin, ancaman boikot KTT G20 juga disuarakan. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, mengatakan negaranya tak akan berpartisipasi dalam pertemuan G20 bila Rusia ikut hadir."Presiden [Joe] Biden telah menyatakan secara jelas, dan saya sangat setuju dengannya, bahwa bisnis dengan Rusia tak bisa berjalan seperti biasa dalam institusi finansial,Saya telah menyatakan secara jelas kepada kolega saya di Indonesia, bahwa kami tidak akan berpartisipasi dan rangkaian pertemuan yang dihadiri perwakilan Rusia," lanjutnya kata Yellen. ⁴⁸Selanjutnya ada Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, merasa tak nyaman membayangkan ia harus duduk bersama Putin dalam pertemuan G20. Terakhir ada Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan Rusia tak bisa menjadi mitra yang konstruktif dalam pertemuan G20, "Yang saya tegaskan adalah, tidak bisa melakukan bisnis seperti biasa saat [Presiden Rusia] Vladimir Putin hanya duduk di meja sembari berpura-pura menerima."⁴⁹

B. Politik Luar Negeri Indonesia dengan prinsip Bebas – Aktif

Sejak 2 September 1948, Pemerintah Indonesia mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Politik yang bebas diartikan bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan dan berhubungan dengan negara mana pun. Kita

⁴⁸ "Seruan Boikot G20 Dinilai Ancam Kedaulatan Indonesia | Republika Online," diakses 9 Mei 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rahfkc396/seruan-boikot-g20-dinilai-ancam-kedaulatan-indonesia>.

⁴⁹ Ibid.

tidak membatasi hubungan dengan bangsa-bangsa Eropa saja atau dengan bangsa Timur saja, tapi berhubungan dengan semua bangsa di dunia. Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Landasan dari jenis politik luar negeri ini secara ketat juga diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.⁵⁰ Bentuk partisipasi atau perwujudan Indonesia dalam politik luar negeri bebas dan aktif antara lain:

a. Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia-Afrika dilaksanakan pada tanggal 18-24 April 1955 di kota Bandung. Tujuan utama dilaksanakannya KAA adalah lahirnya Desa Sila Bandung yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia Afrika ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki potensi besar untuk bisa berkontribusi nyata di dunia internasional, hingga suatu hari dimasa depan nanti, Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang besar dan jaya seutuhnya. Hasil KAA tersebut berhasil membakar semangat, dan memperkuat moral bangsa Asia serta Afrika yang sedang berjuang mencari kemerdekaan kala itu. KAA membawa keuntungan bagi Indonesia, di mana pamornya sebagai negara merdeka, naik karena mampu menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya, yakni pemberian dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda.

⁵⁰ Nikita Rosa, "Mengenal Politik Luar Negeri Indonesia: Prinsip hingga Landasan," detikedu, diakses 5 Mei 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5976954/mengenal-politik-luar-negeri-indonesia-prinsip-hingga-landasan>.

Konferensi Asia Afrika (KAA) juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan serta kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Selain itu, KAA juga menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok.⁵¹

b. Mendirikan Gerakan Non Blok (GNB)

Seusai Perang Dunia II, negara di dunia terbagi ke dalam dua blok, yaitu Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Adanya dua kekuatan ini menyebabkan terjadinya Perang Dingin (Cold War) di antara kedua blok itu. Akibatnya, suhu politik dunia menjadi memanas dan penuh dengan ketegangan-ketegangan. Untuk mengatasi ketegangan Blok Barat dan Blok Timur, bangsa Indonesia pun memprakarsai didirikannya Gerakan Non-Blok. Selain Indonesia, negara pemrakarsa gerakan Non-Blok ada Afghanistan, India, Republik Arab Persatuan (Mesir), dan Yugoslavia. Gerakan Non Blok ini dibentuk atas dasar Dasa Sila Bandung atau hasil konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Non Blok diadakan di Yugoslavia pada 1-6 September 1961. KTT ini dihadiri oleh total 25 negara. Konferensi ini

⁵¹ Kompas Cyber Media, "Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) Halaman all," KOMPAS.com, 20 November 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/20/070000869/penyelenggaraan-konferensi-asia-afrika-kaa->.

bertujuan untuk meredakan ketegangan dunia dan menunjukkan bahwa ada pihak ketiga yang berada di luar kedua blok itu.

c. Membantu penyelesaian konflik Rakhine Myanmar

Kondisi negara bagian Rakhine, Myanmar, kembali memanas. Konflik bersenjata antara pejuang Rohingya dengan tentara Myanmar memaksa puluhan ribu orang melarikan diri ke Bangladesh. Konflik tempat warga minoritas Muslim Rohingya banyak bermukim tersebut sejatinya sudah menahun. Berikut kronologi situasi terakhir di Rakhine. Kelompok militan yang menamakan diri mereka Tentara Penyelamat Arakan Rohingya (ARSA), menyerang tentara, polisi, dan 25 pos perbatasan Myanmar yang berada di Rakhine pada Jumat 25 Agustus 2017. Serangan tersebut kembali membuka luka lama agresi militer ke Rakhine State yang belum lama dihentikan pada Februari. Kekerasan itu menewaskan setidaknya 98 orang.⁵²

Menyikapi situasi yang memanas di Rakhine State, Myanmar, paska serangan kelompok bersenjata di Mangdauw Rakine State. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kemlu, Pemerintah meminta semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak

⁵² “Kronologi Kekerasan di Rakhine Pemicu Eksodus Muslim Rohingya : Okezone News,” diakses 9 Mei 2023, <https://news.okezone.com/read/2017/08/31/18/1767078/kronologi-kekerasan-di-rakhine-pemicu-eksodus-muslim-rohingya>.

asasi manusia masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim. Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan komunikasi dengan National Security Advisor Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State.⁵³

Selain itu, Menlu Retno melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas situasi di Rakhine. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat. Setelah menjalankan sejumlah langkah di atas, mewakili pemerintah Indonesia, Menlu Retno bertolak menuju Myanmar dengan membawa misi “perdamaian dunia”, sesuai yang termaktub dalam tujuan ideal bangsa Indonesia di UUD 1945. Selain bertemu dengan State Counsellor/Menlu Daw Aung San Suu Kyi, Menlu Retno Marsudi juga akan bertemu Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor, U Thaung Tun. Indonesia mengambil langkah diplomasi dengan cara berkunjung melakukan diskusi dengan pemerintah Myanmar karena hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah

⁵³ “InfoPublik - Kronologi Menlu Retno Sebelum Menuju Myanmar Bertemu Aung San Suu Kyi,” diakses 8 Mei 2023, <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/435000/kronologi-menlu-retno-sebelum-menuju-myanmar-bertemu-aung-san-suu-kyi?show=>.

Myanmar dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya akibat konflik yang terjadi Rakhine.⁵⁴

C. Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meyukseskan KTT G20

Bentuk kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan perang Rusia- Ukraina ialah Indonesia selalu konsisten. Konsistensi ini ditunjukkan, pada saat pemungutan suara di sidang majelis umum PBB dimana Indonesia *voted yes* untuk resolusi 'Agression Against Ukraine' pada 2 Maret 2022, dan resolusi '*Humanitarian Consequences of the Agression Againts Ukraine*' pada 24 Maret 2022.⁵⁵

Selain itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ia akan mengunjungi sejumlah negara anggota G20 di Eropa untuk mencari jalan keluar mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina. "Kemungkinan besar saya juga akan berjalan ke Eropa untuk bicara satu per satu dengan anggota G20 bagaimana mencari cara yang paling baik untuk mengatasi situasi yang sangat sulit ini". Selanjutnya Ia mengatakan, sebagai presidensi G20, Indonesia ingin berkontribusi dalam memberi masukan mengenai penyelesaian masalah Ukraina. "Karena kalau semakin panjang enggak selesai, dampaknya akan ke G20 dan ke kita semua,".⁵⁶

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ "RI Setujui Resolusi PBB Soal Serangan Rusia ke Ukraina," diakses 28 April 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220303090659-4-319734/ri-setujui-resolusi-pbb-soal-serangan-rusia-ke-ukraina>.

⁵⁶ Kompas Cyber Media, "Menlu Bakal ke Eropa Temui Negara G20, Cari Jalan Keluar Konflik Rusia-Ukraina," KOMPAS.com, 6 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/06/20245061/menlu-bakal-ke-eropa-temui-negara-g20-cari-jalan-keluar-konflik-rusia>.

Tak hanya itu Menlu menambahkan, di luar negosiasi formal, komunikasi intens dilakukan Indonesia. Semua komunikasi dijalin dengan tiap pihak satu per satu dan dalam semua tingkatan. Retno memberikan salah satu contoh, komunikasi intensif yang dilakukan dengan semua Menlu G20 satu per satu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan september lalu. Di bulan oktober pun Menlu Retno kembali lakukan komunikasi satu per satu dengan mereka, antara lain dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Menteri Luar Negeri Inggris, Menteri Luar Negeri Jerman, Menteri Perdagangan Kanada.⁵⁷

Beliau menambahkan di masa sulit ini, G20 adalah salah satu dari sedikit forum ekonomi dunia yang masih dapat bekerja merespons krisis global saat ini. Taruhannya terlalu besar jika G20 gagal karena menyangkut nasib dan kesejahteraan miliaran penduduk dunia, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia terus mengajak negara anggota G20 untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada dunia. Keberhasilan G20 bukan di tangan satu dua negara, tetapi berada di tangan seluruh anggota G20. Ini adalah keberhasilan bersama.⁵⁸

29 Juni 2022, Presiden Jokowi dan jajarannya berangkat untuk melakukan kunjungan kenegaraan dengan maksud dan tujuan membawa pesan perdamaian ataupun menjadi mediator untuk kedua negara yang berkonflik. Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina. "Saya sampaikan ke Presiden

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid

Zelenskyy bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina," ujar Presiden Jokowi.⁵⁹

Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Presiden Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. "Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelenskyy untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera," imbuhnya.⁶⁰

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kyiv. Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan. "Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini," tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, tak lupa juga Presiden Jokowi kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelenskyy untuk

⁵⁹ "Presiden Jokowi Kunjungan Ke Ukraina Wujud Kepedulian Indonesia Untuk Ukraina | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia," diakses 17 April 2023, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3752/berita/presiden-jokowi-kunjungan-ke-ukraina-wujud-kepedulian-indonesia-untuk-ukraina>.

⁶⁰ Ghita Intan, "Jokowi Undang Presiden Ukraina dan Rusia di KTT G20," VOA Indonesia, 29 April 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-undang-presiden-ukraina-dan-rusia-di-ktt-g20/6550240.html>.

berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerja sama bilateral dengan Ukraina.⁶¹

Selanjutnya selepas berkunjung ke Ukraina, Pak Jokowi juga menyempatkan hadir ke negara Rusia. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia merupakan wujud amanat konstitusi Indonesia untuk berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. “Isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah, saya melakukan kunjungan ke Kyiv dan ke Moskow,” ujar Presiden Jokowi. Terkait dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa ia siap menjadi jembatan komunikasi antara Ukraina dan Rusia. “Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelenskyy untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut,” ucap Presiden Jokowi.⁶²

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Enjay Diana selaku pejabat Fungsional Diplomat Madya Direktorat Eropa II Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri. Beliau menemani langsung Pak Jokowi dalam kunjungan ke Rusia maupun Ukraina. Beliau mengatakan bahwa kunjungan ke Rusia memiliki tujuan atau kepentingan khusus yang berbeda bila dibandingkan

⁶¹ Ibid.

⁶² “Media Asing Sorot Jokowi ke Ukraina-Rusia, Sebut Juru Damai,” diakses 17 April 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220622155339-4-349392/media-asing-sorot-jokowi-ke-ukraina-rusia-sebut-juru-damai>.

dengan kunjungan ke Ukraina. Selain untuk mendorong perdamaian antara keduanya, Indonesia juga menginginkan pihak dari Rusia berinvestasi ke dalam Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Hal itu diperkuat dalam kesempatan yang sama, Pak Jokowi pun menegaskan ia berdiskusi panjang mengenai kerja sama antara Rusia dan Indonesia. Baik di bidang investasi, di bidang perdagangan, maupun di bidang turisme. "Yang akan kita tindaklanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail," kata Jokowi.⁶³

Putin juga menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, fokus pada kerja sama perdagangan dan ekonomi antar kedua negara menunjukkan dinamika positif. Pada tahun 2021, misalnya, perdagangan bilateral tumbuh lebih dari 40% dan naik lebih dari 65% dalam lima bulan pertama tahun ini. "Peluang tambahan untuk membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan dan meningkatnya jumlah pertukaran komersial antara negara kita membuka peluang baru," imbuhnya lagi. "Kami sangat mementingkan menciptakan zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Kami berharap pembicaraan tentang rancangan perjanjian yang sesuai akan diadakan sebelum akhir tahun dan akan membuahkan hasil," tambahnya. "Hubungan kedua negara adalah bersifat konstruktif dan saling menguntungkan. Terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama," ujarnya. Terakhir, Kehadiran Putin di KTT G20 yang akan digelar di Bali,

⁶³ Wawancara dengan Pak Enjay Diana Fungsional Diplomat Madya Direktorat Eropa II Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri pada 16 Januari 2023.

Indonesia pada November mendatang masih juga belum dipastikan. Namun hal ini sempat dibahasnya saat bertemu Jokowi.⁶⁴

Pihak Rusia menyambut baik apa yang menjadi keinginan Indonesia berkunjung ke Moscow "Kami tentu mendukung upaya Indonesia dan Presiden secara pribadi untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan G20 yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia tahun ini," ujar Putin dalam pernyataan resmi Kremlin di situsnya. Pihak Putin sendiri telah menerima undangan KTT G20 dan tertarik berpartisipasi dalam KTT di mana Putin telah diundang untuk hadir secara langsung. Hal ini disampaikan penasehat pemerintah Rusia Yuri Ushakov beberapa waktu lalu.⁶⁵

D. Identifikasi suksesnya KTT G20 tahun 2022 di Bali di tengah perang Rusia - Ukraina

a. Hadirnya kepala negara anggota G20 ke KTT G20 di Bali

Presiden Joko Widodo mengonfirmasi kedatangan para pemimpin negara Group of Twenty (G20) jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 tahun 2022 yang diselenggarakan di Bali. Terdapat 17 dari 20 kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20 yang hadir di konferensi. Dua pemimpin negara besar dunia yang tiba antara lain Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Sebelum kedatangan tiga kepala

⁶⁴ Thea Fathanah Arbar, "Ini Hasil Kunjungan Jokowi ke Rusia, Apa Saja?," CNBC Indonesia, diakses 9 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220701120707-4-352119/ini-hasil-kunjungan-jokowi-ke-rusia-apa-saja>.

⁶⁵ Intan, "Jokowi Undang Presiden Ukraina dan Rusia di KTT G20."

pemerintahan di atas beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20 lainnya juga telah tiba, antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Argentina Alberto Fernandez, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Sementara kepala negara yang menjadi undangan KTT G20 juga beberapa tiba di hari yang sama. Antara lain Presiden Senegal Macky Sall, Presiden Suriname Chandrikapersad Santokhi, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dan Presiden Spanyol Pedro Sanchez.⁶⁶

Dalam waktu yang hampir bersamaan juga tiba pimpinan lembaga dunia seperti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Presiden Uni Eropa Charles Michel, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sehari sebelumnya sebagian delegasi sudah hadir antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Ketua WEF Klaus Martin Schwab, Presiden IsDB Muhammad Sulaiman Al Jasser, Direktur Jenderal

⁶⁶ PDSI KOMINFO, "Presiden Konfirmasi Kehadiran Para Pemimpin Negara Pada KTT G20 Mendatang," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, diakses 4 Mei 2023, <http://content/detail/45381/presiden-konfirmasi-kehadiran-para-pemimpin-negara-pada-ktt-g20-mendatang/0/berita>.

ILO Gilbert F. Houngbo, Menteri Luar Negeri Mexico Marcelo Ebrard Casaubon, serta Menteri Urusan Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.⁶⁷

Oleh karena itu, dengan hadirnya para kepala negara anggota G20 tersebut, Indonesia berhasil meyakinkan para pemimpin - pemimpin dunia untuk hadir langsung mengikuti KTT G20 yang diadakan di Bali di tengah hiruk pikuk perang Rusia – Ukraina dan pemboikotan acara KTT G20 yang dipimpin oleh Indonesia.

b. Sesuai dengan Tema G20 yang Indonesia bawa

Tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Serah terima presidensi dari Italia (selaku Presidensi G20 2021) kepada Indonesia sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia.

Presidensi G20 mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Pada penyelenggaraannya, KTT G20 terbagi dalam tiga sesi utama, yaitu: Ketahanan Pangan dan Energi; Kesehatan; dan Transformasi Digital.

Pada tiap sesi tersebut, Presiden RI telah menekankan beberapa hal penting, antara lain: seruan untuk mengakhiri perang yang memperburuk keadaan krisis pangan, energi, dan keuangan; komitmen 50 juta Dolar AS dari Indonesia untuk Dana Pandemi (Pandemic Fund); mendorong transformasi digital untuk percepatan pemulihan global; dan pentingnya kesetaraan akses

⁶⁷ Ibid.

digital, literasi digital, penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang, dan lingkungan digital yang aman. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Semakin terintegrasinya perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara tidak akan dapat bertahan lama apabila tidak diikuti oleh keberhasilan yang sama di negara-negara lain. Melalui forum G20 tersebut, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global dan pangan secara inklusif.⁶⁸

Pada saat awal menjabat sebagai Presidensi G20 tema awal yang dibawa oleh Indonesia merupakan tema yang berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Namun hal yang tak terduga terjadi, meletusnya perang antara Rusia – Ukraina membuat ekonomi dan sektor lainnya terdampak khususnya bahan pangan. Akibat dari perang tersebut Rusia memblokir jalur perdagangan laut yang membawa biji – bijian dan bahan pangan lainnya dari Ukraina di laut hitam.⁶⁹

Seperti yang diketahui bahwa Ukraina adalah eksportir gandum utama dunia. Maka, imbauan Indonesia sebagai Presidensi KTT G-20 terkait

⁶⁸ Humas, “Keberhasilan Keketuaan Indonesia pada Forum G20,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 30 Desember 2022, <https://setkab.go.id/keberhasilan-keketuaan-indonesia-pada-forum-g20/>.

⁶⁹ PT Suara Khatulistiwa Kalbar, “KEREN! Jokowi Imbau Putin, Blokade Laut Hitam pun Dicabut: Kapal Gandum Pertama Ukraina Tinggalkan Pelabuhan!,” Suarapemredkalbar.com, diakses 8 Mei 2023, <https://www.suarapemredkalbar.com/read/internasional/30062022/keren-jokowi-imbau-putin-blokade-laut-hitam-pun-dicabut-kapal-gandum-pertama-ukraina-tinggalkan-pelabuhan>.

ancaman kelaparan di Afrika dan Timur Tengah dan Blokade Rusia atas Laut Hitam ternyata menyentuh hati Presiden Rusia Vladimir Putin. Terbukti, Kamis, 30 Juni 2022 pagi, Rusia mencabut blokade atas Laut Hitam, rute utama untuk ekspor gandum Ukraina ke seluruh dunia, terutama ke Afrika, yang rentan terancam kelaparan akibat terhentinya ekspor gandum Ukraina.⁷⁰ Menurut Pak Enjay, hal ini dapat dicapai salah satunya adalah karena usaha yang dilakukan oleh Indonesia dalam kunjungannya ke Moskow yang meminta kepada Putin untuk membuka blokade demi nama kemanusiaan. Dilaporkan dari Kota Berdyansk, wilayah Oblast Zaporizhzhia, Ukraina, sebuah kapal yang membawa 7.000 ton gandum meninggalkan pelabuhan Berdyansk pada Kamis pagi ini.⁷¹

Selanjutnya izin berlayarnya kapal itu juga menandai reaksi Putin atas kecaman keras dari Berlin bahwa Rusia menghalangi ekspor gandum Ukraina sekaligus menjadikan kelaparan sebagai senjata untuk memenangkan perang di Ukraina. Sementara itu, Jokowi dalam kunjungan ke Ukraina, menyerukan segala kemungkinan untuk membuka blokir ekspor gandum Ukraina. "Blokir ini harus dibuka dengan jaminan keamanan yang diberikan kepada semua pihak yang berkepentingan," katanya. Pemimpin Indonesia ini membahas masalah tersebut saat berbicara dengan pers setelah pembicaraan dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Kiev, Ibukota Ukraina, Jokowi menambahkan. "Saya sampaikan kepada Presiden Zelensky bahwa Ukraina

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Wawancara dengan Pak Enjay Diana Fungsional Diplomat Madya Direktorat Eropa II Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri pada 16 Januari 2023.

sangat penting dalam ketahanan pangan global. Jadi kita harus melakukan segala kemungkinan untuk memastikan kelancaran ekspor gabah dari Ukraina dan jaminan keamanan bagi semua pemangku kepentingan untuk memastikan ekspor melalui pelabuhan Ukraina,” lanjut Presiden Indonesia.⁷²

Selanjutnya, Pak Enjay mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina menandatangani kesepakatan penting pada 22 Juli 2022 untuk membuka blokir ekspor biji-bijian dari pelabuhan Laut Hitam. Kesepakatan ini dapat meredakan krisis pangan internasional. Perwakilan Rusia dan Ukraina menolak untuk duduk di meja yang sama dan menghindari berjabat tangan pada upacara kesepakatan ekspor gandum di Istanbul. Melalui kesepakatan tersebut, maka gandum senilai sekitar 10 miliar dolar AS akan tersedia untuk dijual. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, sekitar 20 juta ton panen gandum tahun lalu sekarang dapat diekspor.

Akhirnya kesepakatan tersebut akan memulihkan pengiriman biji-bijian dari tiga pelabuhan yang dibuka kembali ke tingkat sebelum perang yaitu sebesar 5 juta ton per bulan. Kesepakatan untuk membuka blokade ekspor diharapkan dapat mencegah kelaparan di negara-negara miskin. Kesepakatan itu juga diharapkan dapat menyuntikkan lebih banyak pasokan

⁷² Loc. cit

gandum, minyak bunga matahari, pupuk dan produk lainnya ke pasar dunia termasuk untuk kebutuhan kemanusiaan.⁷³

c. Penandatanganan Deklarasi Bali

Konferensi Tingkat Tinggi Group Of Twenty (KTT G20) Bali sudah selesai. Kepemimpinan Indonesia pada G20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali meski pada awalnya diragukan banyak pihak. Deklarasi ini memuat poin yang dihasilkan lewat diskusi alot, yakni soal perang Rusia versus Ukraina. Deklarasi KTT G20 Bali terdiri atas 52 paragraf. Paragraf yang dihasilkan lewat diskusi pelik adalah poin nomor 3 soal kondisi geopolitik Ukraina versus Rusia. Istilah yang digunakan tergolong lugas, yakni 'agresi Rusia' dan memuat seruan agar Rusia menarik pasukannya dari Ukraina.⁷⁴

Berikut ini isi lima poin Deklarasi KTT G20 Bali;

1. Empat belas tahun yang lalu, para pemimpin G20 bertemu untuk pertama kalinya, menghadapi krisis keuangan yang paling parah selama generasi kita. Sebagai pihak ekonomi global yang besar, kami mengakui bahwa secara kolektif kami memikul tanggung jawab dan bahwa kerja sama kami diperlukan untuk pemulihan ekonomi global, untuk mengatasi tantangan global, dan meletakkan dasar yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan

⁷³ luc, "Ada Kabar Baik dari Laut Hitam, Krisis Pangan Bakal Mereda," CNBC Indonesia, diakses 11 April 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220722064051-4-357602/ada-kabar-baik-dari-laut-hitam-krisis-pangan-bakal-mereda>.

⁷⁴ Danu Damarjati, "Ini Isi Lengkap Deklarasi KTT G20 Bali, Ada Poin Alot soal Ukraina," detiknews, diakses 9 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6411054/ini-isi-lengkap-deklarasi-ktt-g20-bali-ada-poin-alot-soal-ukraina>.

pertumbuhan inklusif. Kami menetapkan G20 sebagai forum utama untuk kerja sama ekonomi global, dan hari ini kami menegaskan kembali komitmen kami untuk bekerja sama saat sekali lagi kami membahas tantangan ekonomi global yang serius.

2. Kami bertemu di Bali pada 15-16 November 2022, pada saat krisis multidimensi yang tak tertandingi berlangsung. Kita telah mengalami kehancuran akibat pandemi COVID-19, dan tantangan lainnya termasuk perubahan iklim, yang telah menyebabkan kelesuan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, memperlambat pemulihan global, dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Tahun ini, kita juga menyaksikan perang di Ukraina yang berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global. Ada diskusi tentang masalah ini. Kami menegaskan kembali posisi nasional kami sebagaimana diungkapkan dalam forum lain, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, yang dalam Resolusi No. ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022, sebagaimana diadopsi oleh suara mayoritas (141 suara setuju, 5 menentang, 35 abstain, 12 absen) sangat menyesalkan agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina. Sebagian besar anggota mengecam keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan yang ada dalam ekonomi global - menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai

pasokan, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan. Ada pandangan lain dan penilaian berbeda terhadap situasi dan sanksi. Menyadari bahwa G20 bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah keamanan, kami mengakui bahwa masalah keamanan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi ekonomi global.

4. Sangat penting untuk menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. Ini termasuk membela semua Tujuan dan Prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan warga sipil dan infrastruktur dalam konflik bersenjata. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Penyelesaian konflik secara damai, upaya mengatasi krisis, serta diplomasi dan dialog, sangat penting. Zaman sekarang tidak boleh perang.
5. Pada momen kritis ekonomi global saat ini, penting bagi G20 untuk melakukan tindakan nyata, tepat, cepat, dan perlu, menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia, untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional dan kolaborasi nyata. Dalam melakukannya, kami tetap berkomitmen untuk mendukung negara-negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang dan pulau-pulau kecil yang kurang berkembang, dalam menanggapi tantangan-

tantangan global ini dan mencapai SDGs. Sejalan dengan tema Kepresidenan G20 Indonesia- Pulih Bersama, Bangkit Lebih Kuat - kami akan mengambil tindakan terkoordinasi untuk memajukan agenda pemulihan global yang kuat, inklusif, dan tangguh serta pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan.⁷⁵

Dengan demikian apabila merujuk pada definisi dari Anne dalam keberhasilan atau kesuksesan kerjasama Internasional maka Indonesia dapat dikatakan berhasil. Indonesia berhasil membuat 17 dari 20 negara anggota G20 hadir di KTT di Bali. Indonesia juga berhasil membawa forum ini kedalam tema yang telah ditentukan sejak Indonesia pertama kali menjabat sebagai Presidensi. Dimana dalam hal ini sesuai dengan indikator konkret yang dimaksud oleh Anne. Penandatanganan kesepakatan atas deklarasi Bali juga menunjukkan bagaimana Indonesia bisa memimpin forum ini sesuai dengan tupoksinya sebagai Presidensi forum G20 dan membuat negara anggota berada dalam satu kesepakatan yang mengandung visi misi yang sama kedepannya.⁷⁶

Selanjutnya Indonesia juga mendapatkan pujian pujian dari para negara anggota G20. Pak Enjay mengatakan bahwa pujian dan apresiasi juga sudah dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai mampu mendorong dialog guna kepentingan seluruh warga dunia. Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Biden menjadi satu-satunya kepala negara yang memberikan gestur hormat dengan mengangkat tangan kanan sejajar kening

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Wawancara dengan Pak Enjay Diana Fungsional Diplomat Madya Direktorat Eropa II Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri pada 16 Januari 2023.

ketika menemui Presiden Jokowi saat tiba di The Apurva Kempinski, lokasi penyelenggaraan KTT G20. Ada pernyataan terima kasih dan hormat atas kepemimpinan Indonesia selama satu tahun ini, karena komitmen pada upaya perbaikan ekonomi, kesehatan, dan perubahan iklim global.

Selain itu juga ada Pemerintah Rusia, melalui Kementerian Luar Negeri, sebelumnya juga menyuarakan rasa hormatnya atas Presidensi Indonesia pada G20 karena membawa pesan pemersatu. "Kami menyambut baik pendekatan konstruktif kepemimpinan Indonesia saat ini untuk memajukan agenda pemersatu di bawah motto pemulihan ekonomi global pasca krisis," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.⁷⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁷ Liputan6.com, "Rusia Puji Deklarasi KTT G20 di Bali, Meski Singgung Perang di Ukraina," liputan6.com, 18 November 2022, <https://www.liputan6.com/global/read/5129340/rusia-puji-deklarasi-ktt-g20-di-bali-meski-singgung-perang-di-ukraina>.

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup, peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

A. Kesimpulan

Perang Rusia – Ukraina merupakan sebuah konflik antar negara yang secara tidak langsung memberikan dampak terhadap Indonesia bahkan hingga dunia internasional. Terkhusus Indonesia dampak yang paling dirasakan ialah ancaman gagalnya perhelatan forum KTT G20 tahun 2022 di Bali. Indonesia terancam gagal menjadi Presidensi adari forum ekonomi terbsesar di dunia akibat pecahnya perang antara Rusia dann Ukraina.

Dalam skripsi ini, penulis membahas strategi politik luar negeri Indonesia dalam menyukseskan KTT G20 tahun 2022 di tengah perang Rusia – Ukraina dengan mengadopsi dua konsep yaitu *two level game* menurut Robert Putnam. Konsep *two level game* menunjukkan pentingnya partisipasi aktif elemen dalam negeri untuk proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah berperan aktif dalam upayanya menyelamatkan presidensi dan posisi mereka di G20 serta juga memiliki strategi yang matang melalui diplomasi dan mediasi. Indonesia juga mengadopsi strategi politik luar negeri yang berdasarkan pada pandangan nasional tentang peran dan posisi Indonesia dalam hubungan internasional yang

bersifat bebas – aktif. Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, Indonesia menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, dialog, dan kerja sama internasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang telah diwujudkan dan implementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk menyukseskan KTT G20 di Bali telah melebihi ekspektasi. Indonesia yang diawal diremehkan terkait posisinya sebagai Presidensi G20 ternyata mampu untuk meyakinkan negara anggota forum G20 untuk hadir di Bali. Selain itu juga tema yang telah dipersiapkan selama satu tahun lamanya sejak Indonesia menjabat sebagai Presidensi berhasil terlaksana dengan terjadinya kesepakatan ekonomi bersama. Selanjutnya yang terakhir penandatanganan yang dilakukan oleh negara anggota forum G20 adalah salah satu bukti bahwasannya Indonesia berhasil membuat negara – negara anggota tetap memiliki visi yang sama.

Oleh karena itu strategi politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia sangatlah penting bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri maupun bagi dunia internasional. Itu sebabnya Indonesia menerima respon yang positif dari banyak pihak atas keberanian dan keberhasilannya dalam membangun citra yang baik di dunia internasional

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada beberapa pihak :

1. Pemerintah Indonesia

Agar selalu tetap konsisten menyuarakan perdamaian dan penghapusan kolonialisme dalam dunia ini. Tidak peduli seberapa banyak tekanan yang diperoleh Indonesia dari luar prinsip untuk selalu menjunjung tinggi perdamaian tetap harus terus di kobarkan. Namun perlu dipahami bahwa sikap Indonesia dalam konflik ini kurang begitu tegas. Itu terlihat dari beberapa kali kesempatan Presiden RI ataupun Menteri Luar Negeri Indonesia tidak secara gamblang bahwa Rusia meng invasi Ukraina. Berbeda halnya dengan situasi Israel - Palestina dimana Indonesia tegas mengutuk dan memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus berani menyatakan sikap terkait hal ini, dikhawatirkan dimasa mendatang akan menjadi bumerang sendiri bagi pemerintahan Indonesia.

2. Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini, peneliti merasa masih terdapat banyak kekurangan. Data yang diperoleh juga masih kurang karena terkendala respon dari narasumber dan keterbatasan waktu penelitian. Maka dari itu, masih terbuka kesempatan yang lebar untuk melakukan penelitian dengan topik sejenis.

3. Pembaca

Untuk semua pembaca, peneliti berharap penelitian ini dapat semakin menguatkan semangat untuk selalu melihat arah kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih kritis dan luas lagi

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Wawancara dengan Pak Enjay Diana, Fungsional Diplomat Madya Direktorat Eropa II Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri pada 16 Januari 2023.

Buku

C., Jönsson, and M. Hall. *Essence of Diplomacy*. Sweden: Palgrave Macmillan, 2013.

D. Putnam, Robert. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games." *The MIT Press* 42, no. 3 (Summer 1988): 445.

Holsti, K. J. "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy." *Oxford University Press*, 3, 14 (1970). <https://doi.org/10.2307/3013584>.

K. G Nossal, R. A Higgott, and A Cooper. *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*. Canada: UBC Press, 1993.

Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Rourke, J. T, and M. A. Boyer. *International Politics on the World Stage*. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2005.

Jurnal

Singer, J. David, and Melvin Small. "Foreign Policy Indicators: Predictors of War in History and in the State of the World Message." *Springer* 5, no. 3 (n.d.): 1974.

Karina, Maria Elsa. "Perbandingan Kebijakan Malaysia Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya." *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26770>.

Rahakundini Bakrie, Connie, and Mariane Olivia Delanova. "Pengaruh Perang Rusia Dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara" 6, no. 1 (n.d.).

Khairunnisa, Brilliant Windy. "Resolusi Konflik Pakistan Dan India Dalam Perebutan Wilayah Kashmir Dan Peluang Mediator Bagi Indonesia." *JURNAL ILMIAH WIDYA SOSIOPOLITIKA*, no. E-ISSN 2685-4570 (2021).

- Bion, Randy Bramastya, Runitya Rompa Batan, "Pendekatan Diplomasi Ekonomi dalam Konflik Rusia-Ukraina" *Jurnal Sospoli* 6, no. 2 (2022):
- Rethorika. Dan Suryansyah Berthanila, "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina" *Jurnal Power International Relation* 7 No. 1 (2022)
- Izzuddin, Adib Rossi Indra korniawan, dan Hastian Akbar Stiarso, "Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia - Ukraina Tahun 2022" *Jurnal Pena Wimaya* 2 No. 2, (2022)
- Hidriyah, Sita "Eskalasi Ketegangan Rusia – Ukraina," *Jurnal Info Singkat* 14, No. 4 2022
- Basir, Abdul Donny Polanunu, Demeiati Nur Kusumaningrum "Indonesia Sebagai Middle Power Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy," *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)* Vol. 4 No.2, (2022)
- Alif, Rizky Alvian, Ganesh Cintika Putri, dan Irfan Ardhani, "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi ‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo", *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 6, NO. 2, (2018)
- Efstathopoulos, Charalampos "Middle Powers and the Behavioural Model", *Global Society, Aberystwyth University* (2018)
- Haryanto, Agus, "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran:," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume IV No.II/ (2014)
- Jordan, Eduard "The concept of a middle power in international relations: distinguishing between emerging and traditional middle powers" *Politikon South African Journal of Political Studies* 30(2) (2003)
- Olivia, Yessi SIP, MIntRel, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 1 (2013)
- Rijali, Ahmad "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17 No, 33, (2018)
- Andi, I Komang Antara Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Komang Febrinayanti Dantes, "Penyelesaian Sengketa Internasional Pada

Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3. (2022)

Prayoga, Inggardkk, "Kerjasama Pembangunan Indonesia dan Uni Eropa: Suatu Analisis Teori Liberalisme dalam Hubungan Internasional", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume V No.1/Juni 2015

Ryyan. Achmad Andifaprasta, "Biografi Politik Mohammad Hatta: Historiografi Pemikiran Politik Luar Negeri Bebas - Aktif," Universitas Brawijaya, Skripsi 2019

Budi, Agus Yulianto, "Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966" Universitas Sanatha Darma Yogyakarta Skripsi 2008

Tri Utami, Arum "Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008", Insignia Journal of International Relations 3(02):1 November 2016

Skripsi

Ainul, Muh Amal, "Persaingan Amerika Serikat - RRT Kepada Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Politik luar Negeri Bebas Aktif." Universitas Hasanuddin, Skripsi (2021)

Internet

"Apa itu G20 dan Manfaatnya untuk Indonesia." Diakses 10 April 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html>.

Arbar, Thea Fathanah. "Ini Hasil Kunjungan Jokowi ke Rusia, Apa Saja?" CNBC Indonesia. Diakses 9 Mei 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220701120707-4-352119/ini-hasil-kunjungan-jokowi-ke-rusia-apa-saja>.

"Crimea Vote Deepens Crisis and Draws Denunciations - The New York Times." Diakses 10 April 2023. <https://www.nytimes.com/2014/03/07/world/europe/ukraine.html>.

Damarjati, Danu. "Ini Isi Lengkap Deklarasi KTT G20 Bali, Ada Poin Alot soal Ukraina." detiknews. Diakses 9 Mei 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6411054/ini-isi-lengkap-deklarasi-ktt-g20-bali-ada-poin-alot-soal-ukraina>.

- “Dampak Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Supply Chain Indonesia.” Diakses 28 April 2023. <https://www.abcxpress.id/blog/invasi-rusia-ukraina-supply-chain>.
- “G20: Negara Baratancam boikot KTT G20, upaya lobi Indonesia ‘diragukan berhasil’ dan diminta ‘tetap netral’ - BBC News Indonesia.” Diakses 3 Mei 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61007312>.
- Humas. “Keberhasilan Keketuaan Indonesia pada Forum G20.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 30 Desember 2022. <https://setkab.go.id/keberhasilan-keketuaan-indonesia-pada-forum-g20/>.
- Ikhsanudin, Arief. “HMI Desak Pemerintah RI Tolak Vladimir Putin di KTT G20.” detiknews. Diakses 5 Mei 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6004861/hmi-desak-pemerintah-ri-tolak-vladimir-putin-di-ktt-g20>.
- “Indonesia Turun Tangan Bantu Rohingya – DW – 04.09.2017.” Diakses 18 April 2023. <https://www.dw.com/id/indonesia-turun-tangan-bantu-rohingya/a-40351496>.
- “InfoPublik - Kronologi Menlu Retno Sebelum Menuju Myanmar Bertemu Aung San Suu Kyi.” Diakses 8 Mei 2023. [https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/435000/kronologi-menlu-retno-sebelum-menuju-myanmar-bertemu-aung-san-suu-kyi?show=.](https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/435000/kronologi-menlu-retno-sebelum-menuju-myanmar-bertemu-aung-san-suu-kyi?show=)
- Intan, Ghita. “Jokowi Undang Presiden Ukraina dan Rusia di KTT G20.” VOA Indonesia, 29 April 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-undang-presiden-ukraina-dan-rusia-di-ktt-g20/6550240.html>.
- Kalbar, PT Suara Khatulistiwa. “KEREN! Jokowi Imbau Putin, Blokade Laut Hitam pun Dicabut: Kapal Gandum Pertama Ukraina Tinggalkan Pelabuhan!” Suarapemredkalbar.com. Diakses 8 Mei 2023. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/internasional/30062022/keren-jokowi-imbau-putin-blokade-laut-hitam-pun-dicabut-kapal-gandum-pertama-ukraina-tinggalkan-pelabuhan>
- KOMINFO, PDSI. “Presiden Konfirmasi Kehadiran Para Pemimpin Negara Pada KTT G20 Mendatang.” Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses 4 Mei 2023. <http://content/detail/45381/presiden-konfirmasi-kehadiran-para-pemimpin-negara-pada-ktt-g20-mendatang/0/berita>.

- “Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina.” Diakses 10 April 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina>.
- “Kronologi Kekerasan di Rakhine Pemicu Eksodus Muslim Rohingya: Okezone News.” Diakses 9 Mei 2023.
<https://news.okezone.com/read/2017/08/31/18/1767078/kronologi-kekerasan-di-rakhine-pemicu-eksodus-muslim-rohingya>.
- Liputan6.com. “Rusia Puji Deklarasi KTT G20 di Bali, Meski Singgung Perang di Ukraina.” liputan6.com, 18 November 2022.
<https://www.liputan6.com/global/read/5129340/rusia-puji-deklarasi-ktt-g20-di-bali-meski-singgung-perang-di-ukraina>.
- luc. “Ada Kabar Baik dari Laut Hitam, Krisis Pangan Bakal Mereda.” CNBC Indonesia. Diakses 11 April 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220722064051-4-357602/ada-kabar-baik-dari-laut-hitam-krisis-pangan-bakal-mereda>.
- “Media Asing Sorot Jokowi ke Ukraina-Rusia, Sebut Juru Damai.” Diakses 17 April 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220622155339-4-349392/media-asing-sorot-jokowi-ke-ukraina-rusia-sebut-juru-damai>.
- Media, Kompas Cyber. “Menlu Bakal ke Eropa Temui Negara G20, Cari Jalan Keluar Konflik Rusia-Ukraina.” KOMPAS.com, 6 April 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/06/20245061/menlu-bakal-ke-eropa-temui-negara-g20-cari-jalan-keluar-konflik-rusia>.
- Kompas. “Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) Halaman all.” KOMPAS.com, 20 November 2022.
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/20/070000869/penyelenggaraan-konferensi-asia-afrika-kaa->.
- Kompas. “Peran Indonesia dalam Penyelesaian Masalah Kamboja.” KOMPAS.com, 24 Juni 2022.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/24/110000379/peran-indonesia-dalam-penyelesaian-masalah-kamboja>.
- “Presiden Jokowi Kunjungan Ke Ukraina Wujud Kepedulian Indonesia Untuk Ukraina | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Diakses 17 April 2023. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3752/berita/presiden-jokowi-kunjungan-ke-ukraina-wujud-kepedulian-indonesia-untuk-ukraina>.

- RI, Setjen DPR. “Beri Keterangan Uji Materiil UU Pengadilan HAM, DPR Tegaskan Indonesia Terapkan Politik Bebas Aktif.” Diakses 5 Mei 2023. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42056>.
- “RI Setujui Resolusi PBB Soal Serangan Rusia ke Ukraina.” Diakses 28 April 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220303090659-4-319734/ri-setujui-resolusi-pbb-soal-serangan-rusia-ke-ukraina>.
- Rosa, Nikita. “Mengenal Politik Luar Negeri Indonesia: Prinsip hingga Landasan.” detikedu. Diakses 5 Mei 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5976954/mengenal-politik-luar-negeri-indonesia-prinsip-hingga-landasan>.
- “Seruan Boikot G20 Dinilai Ancam Kedaulatan Indonesia | Republika Online.” Diakses 9 Mei 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rahfkc396/seruan-boikot-g20-dinilai-ancam-kedaulatan-indonesia>.
- SINDOnews.com. “Sri Mulyani Beberkan Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Pertemuan G20.” Diakses 30 April 2023. <https://ekbis.sindonews.com/read/800039/33/sri-mulyani-beberkan-dampak-perang-rusia-ukraina-terhadap-pertemuan-g20-1655374018>.
- Wardah, Fathiyah. “DPR Desak Presiden Jokowi Berperan Aktif dalam Meredakan Konflik Rusia-Ukraina.” VOA Indonesia, 7 April 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/dpr-desak-presiden-jokowi-berperan-aktif-dalam-meredakan-konflik-rusia-ukraina-/6518797.html>.
- VOA. “Indonesia Minta India dan Pakistan Utamakan Dialog Dalam Isu Kashmir.” VOA Indonesia, 16 Agustus 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-minta-india-dan-pakistan-utamakan-dialog-dalam-isu-kashmir/5043668.html>.
- Yunni, Kadek. “Kerjasama Multilateral: Pengertian - Manfaat dan Contohnya.” HaloEdukasi.com, 24 Agustus 2021. <https://haloedukasi.com/kerjasama-multilateral>.